

INDIKATOR

Kesejahteraan

Rakyat

2018

Katalog : 41020047315



KABUPATEN
PINRANG



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG

INDIKATOR
Kesejahteraan
Rakyat

2018



KABUPATEN
PINRANG



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pinrang 2018

Katalog BPS: 4102004.7315

Ukuran Buku: 15 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xiii+95

Naskah:

Veronika Ratih Andriani, SST
Staf Seksi Statistik Sosial Kabupaten Pinrang

Gambar Kulit:

Seksi Nerwilis BPS Kabupaten Pinrang

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Kata Pengantar

Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kabupaten Pinrang tahun 2018 memuat berbagai indikator antara lain: indikator Kependudukan, Keluarga Berencana (KB), Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan dan indikator-indikator lainnya.

Publikasi ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen BPS akan data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di wilayah Kabupaten Pinrang tahun 2017. Selain itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pembangunan daerah, khususnya di bidang sosial. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan. Terimakasih kepada pihak yang membantu terbitnya publikasi ini. Saran dan kritik sangat kami harapkan.

Pinrang, Oktober 2018

BPS KABUPATEN PINRANG

Kepala


H. Muh. Asri Lantong, SE

196611211993011001

Daftar Isi

Halaman

Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Bab I	
Pendahuluan	1
1.1 Konsep Dan Definisi	2
Bab II	
Kependudukan	7
2.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)	8
2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk	9
2.3 Persebaran dan Komposisi Penduduk	10
2.4 Angka Beban Ketergantungan (ABT)	13
Bab III	
Keluarga Berencana	17
3.1 Status Perkawinan	18
3.2 Umur Kehamilan Pertama	19
3.3 Pemakaian Alat/Cara KB	22

3.4 Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (ALH)	27
Bab IV	
Pendidikan	31
4.1 Angka Melek Huruf (AMH)	32
4.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	33
Bab V	
Kesehatan	37
5.1 Angka Kesakitan/ Morbiditas	38
5.2 Penolong Persalinan	38
5.3 Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	42
5.4 Imunisasi	45
Bab VI	
Ketenagakerjaan	49
6.1 Konsep Ketenagakerjaan	50
6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	52
6.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	54
6.4 Bekerja	58
6.5 Jumlah Jam Kerja	64
Bab VII	
Fasilitas Perumahan	67

7.1 Kualitas Rumah Tinggal	67
7.1.1 Jenis Dinding Rumah	68
7.1.2 Jenis Atap	69
7.1.3 Jenis dan Luas Lantai	70
7.2 Fasilitas Rumah	73
7.2.1 Air Minum Bersih	74
7.2.2 Sumber Penerangan Listrik	76
7.2.3 Tempat Pembuangan Tinja	77
7.3 Status Kepemilikan Rumah	79
Bab VIII	
Konsumsi Rumah Tangga dan Kemiskinan	83
8.1 Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan	84
8.2 Penduduk Miskin	88
Daftar Pustaka	94

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1. Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2017	9
Tabel 2. Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015-2017	14
Tabel 3. Persentase Ijazah/STTB yang dimiliki Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin, 2017	34
Tabel 4. TPAK Kabupaten Pinrang Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Tahun 2014-2015	54
Tabel 5. TPT Kabupaten Pinrang Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2015	56
Tabel 6. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah, Tahun 2017	72
Tabel 7. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah, Tahun 2017	73
Tabel 8. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah) Menurut Kelompok Barang Dan Daerah Tempat Tinggal, Maret 2017	87
Tabel 9. Garis Kemiskinan Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2017	89
Tabel 10. Tabel Kemiskinan Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2017	92

Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2017	10
Gambar 2. Piramida Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2017	12
Gambar 3. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2017	18
Gambar 4. Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Kehamilan Pertama, 2017	21
Gambar 5. Prevalensi Pemakaian Alat/Cara KB Perempuan Berstatus Kawin Umur 15-49 Tahun 2017 (%)	23
Gambar 6. Prevalensi Pemakaian Alat/Cara KB Perempuan Berstatus Kawin Umur 15-49 Tahun 2017	24
Gambar 7. Persentase Perempuan Pernah Kawin (WPK) Menurut Jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH), Tahun 2017	27
Gambar 8. Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2017	32

Gambar 9. Persentase Ijazah/STTB yang dimiliki Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin, 2017	33
Gambar 10. Persentase Keluhan Kesehatan yang Diderita Selama Sebulan Terakhir, 2017	38
Gambar 11. Persentase Jenis Keluhan Kesehatan yang Diderita Penduduk Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin, 2017	39
Gambar 12. Persentase Penduduk yang Menderita Gangguan Kesehatan Sebulan yang Lalu Menurut Lamanya Hari Gangguan Kesehatan, Jenis Kelamin, 2017	40
Gambar 13. Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, 2017	41
Gambar 14. Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, 2017	42
Gambar 15. Persentase Balita umur 0-23 bulan Menurut Pemberian Air Susu Ibu (ASI), 2017	44
Gambar 16. Persentase Balita Yang Masih Diberi Air Susu Ibu (ASI) Menurut Lama Diberi ASI dan Jenis Kelamin, 2017	45
Gambar 17. Persentase Balita Menurut Pemberian Imunisasi, 2017	46
Gambar 18. Persentase Balita Menurut Pemberian Imunisasi dan Jenis Kelamin, 2017	47
Gambar 19. Diagram Ketenagakerjaan, BPS	51
Gambar 20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Total, serta Persentase Angkatan Kerja dan	

Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2017	52
Gambar 21. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Termasuk Angkatan Kerja, 2017	55
Gambar 22. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2017	58
Gambar 23. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Wilayah dan Lapangan Usaha Utama, 2017	59
Gambar 24. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha Utama, 2017	61
Gambar 25. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2017	62
Gambar 26. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2017	63
Gambar 27. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu, 2017	65
Gambar 28. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas, 2017	69
Gambar 29. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas, 2017	70
Gambar 30. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas, 2017	71

Gambar 31. Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Air Minum, 2017	74
Gambar 32. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air untuk Memasak, 2017	75
Gambar 33. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik, 2017	76
Gambar 34. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2017	78
Gambar 35. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2017	80
Gambar 36. Persentase Konsumsi makanan dan non makanan penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2017	85
Gambar 37. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2014	90

Bab I

Pendahuluan

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan mempunyai makna yang luas, tidak hanya terkait dengan terpenuhinya kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan tetapi juga menyangkut pemenuhan aspek kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup bahkan rasa aman. Oleh karena itu, indikator pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita saja tidak cukup untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Diperlukan indikator-indikator lain seperti banyaknya penduduk yang bersekolah, tingkat kesehatan masyarakat, dan tingkat kemiskinan untuk mendapatkan gambaran kesejahteraan secara utuh.

Ketersediaan data-data terkait sosial dan ekonomi sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan pembangunan telah dicapai pemerintah suatu daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) diberi amanat oleh undang-undang untuk melaksanakan kegiatan statistik dasar. Statistik dasar adalah menyediakan data-data sosial maupun ekonomi melalui berbagai survei dan sensus. Hasil dari kegiatan tersebut kemudian dibukukan

menjadi beragam publikasi, salah satunya Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra).

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat menyajikan berbagai indikator dasar yang terkait dengan kependudukan, keluarga berencana (KB), pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan pengeluaran konsumsi. Data-data yang ditampilkan merupakan hasil dari survei-survei BPS, diantaranya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2017 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2017.

1.1 Konsep Dan Definisi

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan, BPS telah menentukan konsep dan definisi untuk setiap variabel yang akan dikumpulkan. Definisi tersebut baku dan berlaku secara umum untuk setiap publikasi yang dikeluarkan BPS.

Konsep	Definisi
Rumah Tangga Biasa	adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu
Kepadatan Penduduk	adalah rata-rata banyaknya penduduk per km ²
Rasio Jenis Kelamin	adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan dikali 100

Kawin	adalah mempunyai istri/suami pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum, tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri
Cerai Hidup	adalah berpisah sebagai suami/istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ke tempat lain karena mencari pekerjaan
Cerai Mati	adalah ditinggal mati oleh suami/istrinya dan belum kawin lagi
Metode Kontrasepsi	adalah alat/cara pencegah kehamilan
Sekolah	adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal mulai dari pendidikan sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan
Tidak atau Belum Pernah Sekolah	adalah tidak atau belum pernah sekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan ke SD
Masih Bersekolah	adalah sedang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi
Tidak Sekolah Lagi	adalah pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi
Melek Huruf	adalah penduduk 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya
Angka Partisipasi	adalah partisipasi penduduk usia tertentu yang masih

Sekolah	sekolah atau jenjang pendidikan tertentu terhadap seluruh penduduk pada umur tersebut
Keluhan Kesehatan	adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, atau hal lain. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya
Penduduk Usia Kerja	Adalah penduduk yang berusia 10 tahun keatas
Angkatan Kerja	Adalah penduduk usia 10 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan
Angkatan Kerja	Adalah penduduk usia 10 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan
Bukan Angkatan Kerja	mereka yang berusia 10 tahun keatas, selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumahtangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang tidak dapat dimasukkan dalam kategori bekerja/mencari pekerjaan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Perbandingan antara penduduk usia 10 tahun keatas (usia kerja) dengan angkatan kerja
Penganggur	Adalah mereka yang termasuk angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan

Bekerja	Kegiatan melakukan pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja
Angka Beban Tanggungan	Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia non produktif (usia dibawah 15 tahun dan usia 65 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (antara usia 15 tahun sampai usia 64 tahun) dikali 100

PADA TAHUN

2017, PENDUDUK PEREMPUAN LEBIH BANYAK DARIPADA PENDUDUK LAKI-LAKI



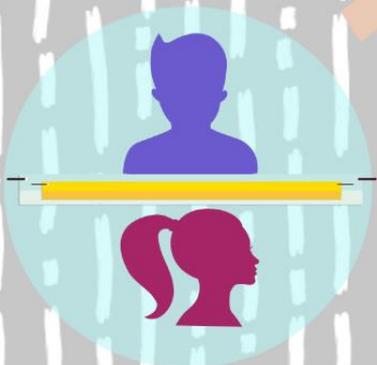
180.586 jiwa



191.644 jiwa



372.230 jiwa



Sex Rasio
(Rasio jenis kelamin):
94,23

berarti dari setiap 100
penduduk wanita terdapat
sekitar 94 penduduk laki-laki

Sumber : Proyeksi Penduduk
Kabupaten Pinrang

Bab II

Kependudukan

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Namun di sisi lain, penduduk juga merupakan beban untuk mencapai pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah baik sosial maupun ekonomi. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menuntut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan produksi pangan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali juga berpotensi menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk di suatu wilayah mempengaruhi taraf kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Jika suatu wilayah memiliki jumlah penduduk yang besar sementara pendapatan regional di wilayah tersebut relatif kecil akan mengakibatkan pendapatan per kapita wilayah tersebut rendah.

Permasalahan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali serta kesejahteraan

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pinrang 2018

masyarakat yang rendah akan mendorong munculnya permasalahan-permasalahan sosial. Ketimpangan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan dan kemiskinan merupakan beberapa faktor yang dapat memicu tindak kriminalitas.

Permasalahan kependudukan mencakup aspek yang sangat luas, baik sosial maupun ekonomi. Penanganan permasalahan juga membutuhkan koordinasi lintas sektoral agar dapat dicapai penyelesaian yang komprehensif. Mengingat pentingnya aspek penduduk dalam pembangunan, maka diperlukan dukungan data-data kependudukan dalam perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Bab ini akan membahas berbagai indikator dasar kependudukan yang meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan komposisi penduduk, serta angka beban ketergantungan.

2.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Pinrang tercatat sebesar 372.230 jiwa dengan rincian laki-laki 180.586 jiwa dan perempuan 191.644 jiwa. Rasio jenis kelamin 94,23 yang berarti dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 94 penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan proporsi penduduk laki-laki terhadap perempuan yang semakin meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2017.

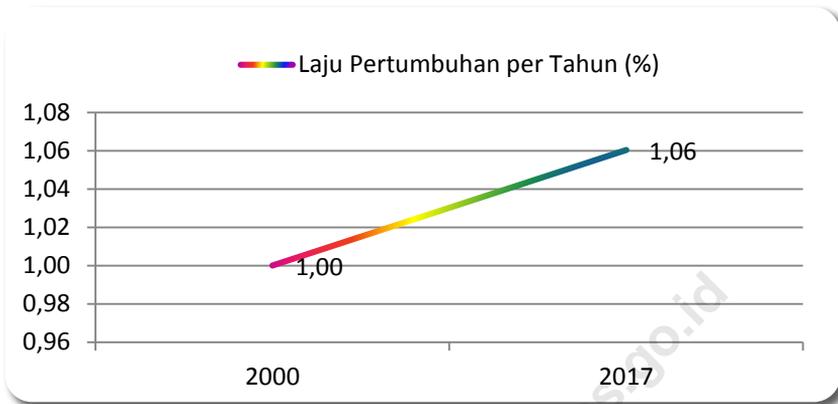
Tabel 1. Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(4)
2014	364,1	94,07
2015	366,8	94,19
2016	369,6	94,24
2017	372,2	94,23

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Pinrang 2010-2020

2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi di suatu daerah. Indikator ini sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah pada masa yang akan datang. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, dapat diketahui pula kebutuhan dasar penduduk di wilayah tersebut di berbagai bidang. Akan tetapi, prediksi jumlah penduduk masih harus dilengkapi dengan berbagai macam karakteristik penduduknya agar dapat dipergunakan secara tepat sasaran.



Gambar 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2017

Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Pinrang dihitung dengan menggunakan metode Geometrik, dan tahun dasarnya adalah jumlah penduduk tahun 2000. Tahun 2017, diperoleh angka Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pinrang sebesar 1,06 persen. Hal ini bermakna setiap tahun antara tahun 2000 dengan tahun 2017, rata-rata penambahan jumlah penduduk Kabupaten Pinrang per tahun adalah sebesar 1,06 persen dari tahun dasarnya.

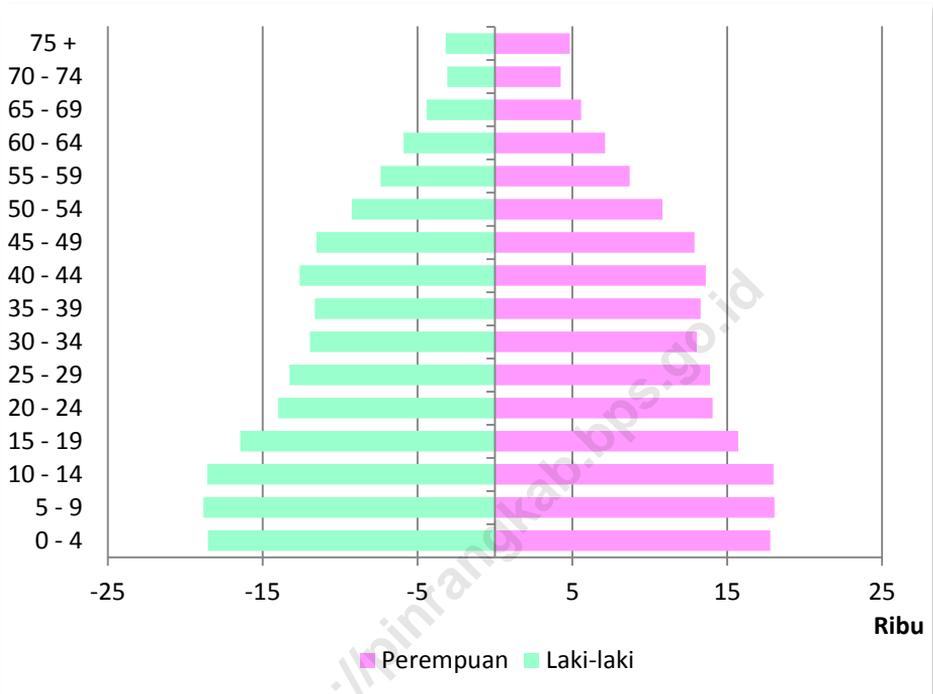
2.3 Persebaran dan Komposisi Penduduk

Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan permasalahan di hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Pinrang. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk berada di wilayah perkotaan. Hal ini dipicu oleh

keinginan masyarakat untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Pinrang. Persebaran penduduk terpusat di ibukota kabupaten yaitu Kecamatan Watang Sawitto serta wilayah sekitarnya, seperti Paleteang dan Tiroang.

Tahun 2017, kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Pinrang adalah 189,74 jiwa per km². Angka ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 189 sampai 190 jiwa di tiap km² luas wilayah Kabupaten Pinrang. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Lembang. Meskipun merupakan kecamatan yang terluas dan memiliki potensi perkebunan, namun secara geografis Kecamatan Lembang terdiri atas daerah pegunungan dengan infrastruktur yang belum memadai, sehingga banyak penduduk yang memilih menetap di daerah lain dibandingkan Lembang.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan fertilitas (kelahiran), migrasi (perpindahan penduduk), serta mortalitas (kematian). Piramida penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2017 termasuk jenis piramida penduduk muda (expansive). Bentuk piramida penduduk yang menyerupai segitiga menunjukkan tingkat fertilitas yang relatif tinggi dan mortalitas yang rendah. Yaitu memiliki bentuk yang lebar pada kelompok umur 0-19 tahun, sedangkan pada usia tua sangat sedikit.



Gambar 2. Piramida Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2017

Balok piramida yang memanjang pada kelompok umur 0-4 tahun menunjukkan fertilitas yang tinggi. Balok piramida yang memendek pada kelompok umur 15-19 tahun dan kelompok umur di atasnya mengindikasikan adanya migrasi penduduk keluar dari Kabupaten Pinrang untuk berbagai alasan, misalnya melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, maupun perkawinan. Bentuk balok piramida semakin memendek pada kelompok umur 30-39 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang melakukan migrasi keluar semakin besar. Pada kelompok umur 40-44 tahun

balok piramida terlihat memanjang yang mengindikasikan adanya migrasi masuk ke Kabupaten Pinrang. Migrasi masuk ini umumnya adalah penduduk yang kembali dari perantauan dengan berbagai alasan, misalnya ingin mengurus orang tua atau mereka tidak dapat lagi bekerja di perantauan karena usia yang semakin tua. Sementara itu, tingkat mortalitas yang tinggi terlihat dari bentuk balok piramida yang semakin mengecil dari kelompok umur 50-75+ tahun.

Jika diamati lebih dalam, pada umur berakhiran 0 dan 5 balok piramida cenderung lebih menonjol dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Fenomena ini menunjukkan adanya kesalahan pelaporan umur. Ketika seseorang tidak mengingat secara pasti tanggal lahirnya, maka ada kecenderungan umur yang diingat berakhiran 0 atau 5. Hal ini merupakan kesalahan yang tidak dapat dihindari dikarenakan pencacatan kelahiran dan kematian di Indonesia masih belum dilakukan dengan baik.

2.4 Angka Beban Ketergantungan (ABT)

Angka Beban Ketergantungan (ABT) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Penduduk usia produktif disebut juga angkatan kerja yang dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya, sebaliknya penduduk usia non produktif adalah bukan angkatan kerja yang tidak dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, ABT dapat menjadi indikator kasar kondisi ekonomi suatu wilayah.

Tabel 2. Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2017

Kelompok Umur	2016			2017		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14	15,19	14,60	29,79	15,03	14,47	29,50
15-64	30,52	33,00	63,52	30,62	33,08	63,69
65+	2,81	3,88	6,69	2,86	3,94	6,81
ABT Muda	49,77	44,26	46,91	49,10	43,74	46,32
ABT Tua	9,20	11,77	10,53	9,36	11,91	10,68
ABT	58,96	56,03	57,44	58,46	55,66	57,00

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2035 (diolah)

Semakin tinggi ABT, semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, begitu juga sebaliknya. ABT sebesar 57,00 persen pada tahun 2017 di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang penduduk umur produktif menanggung 57 penduduk umur tidak produktif. Nilai ABT Kabupaten Pinrang termasuk dalam kategori tinggi.

Berdasarkan tabel di atas, ABT Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 menurun dibandingkan tahun 2016. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu peningkatan proporsi penduduk usia produktif dan penurunan proporsi penduduk usia non produktif (kelompok 0-14 tahun) pada tahun 2017. Penurunan ABT tentu menjadi sinyal yang baik bagi pemerintah karena menunjukkan penurunan beban ekonomi. Peningkatan proporsi penduduk usia produktif dari 63,52 persen pada tahun 2016 menjadi 63,69 persen pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk yang potensial sebagai modal dasar pembangunan di Kabupaten Pinrang. Di sisi lain, keberhasilan pengendalian angka kelahiran juga akan mendorong terhadap penurunan ABT dengan mengurangi proporsi penduduk muda yang belum produktif.

Sementara itu, jika dilihat dari jenis kelaminnya, terlihat bahwa ABT laki-laki pada usia 0-14 tahun (ABT Muda) lebih tinggi dibandingkan perempuan, baik pada tahun 2016 maupun tahun 2017. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk laki-laki di usia muda lebih besar daripada perempuan sedangkan pada saat usia produktif cenderung menurun, baik karena migrasi maupun kematian. Sementara itu, pada usia 65 tahun ke atas nilai ABT (ABT Tua) untuk perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh usia harapan hidup perempuan yang lebih panjang daripada laki-laki.

STATUS PERKAWINAN PINRANG TAHUN 2017

Tahun lalu peringkat 7,
Tahun 2017 naik,
PERINGKAT KE-6

Mayoritas Penduduk Umur 10 Tahun
Keatas Berstatus Kawin



Belum Kawin



Kawin

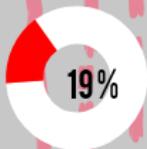


Cerai Hidup

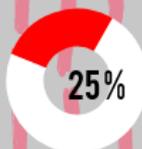


Cerai Mati

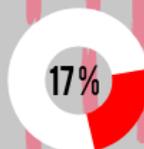
Umur KEHAMILAN Pertama



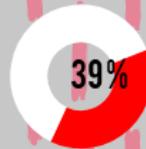
<17
Tahun



17-18
Tahun



19-20
Tahun



>20
Tahun

Terlalu Muda,
Mental & Sistem
Reproduksi Belum Siap



SUMBER: SUSENAS 2017

Bab III

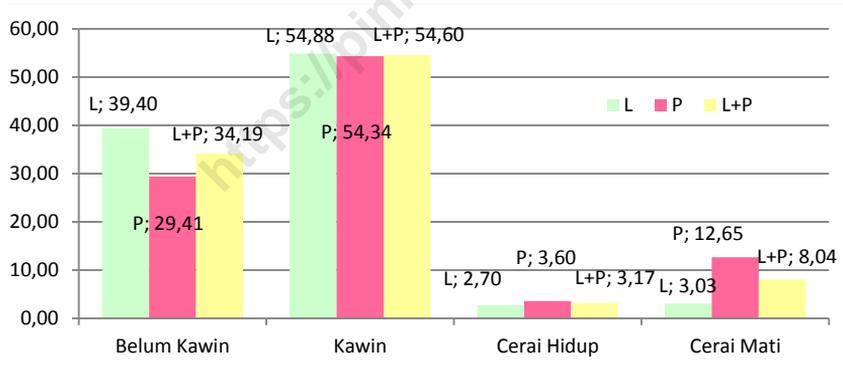
Keluarga Berencana

Undang-Undang N0. 52 Tahun 2009 menekankan bahwa Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengamanatkan perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumberdaya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah dengan menerapkan program Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran bayi melalui penggunaan alat-alat kontrasepsi seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Selain itu, melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1, pemerintah menetapkan umur minimum perkawinan pada perempuan 16 tahun, sedangkan laki-laki 19 tahun.

3.1 Status Perkawinan

Konsep perkawinan yang digunakan dalam pengumpulan data demografi BPS lebih difokuskan pada kondisi dimana laki-laki dan perempuan hidup bersama untuk waktu yang lama baik yang dikukuhkan dalam perkawinan yang sah menurut Undang-undang (de Jure) maupun tanpa pengesahan perkawinan (de Facto). Hal ini dilakukan terutama untuk memperoleh pendekatan yang lebih tepat mengenai keterkaitan antara status perkawinan dengan tingkat fertilitas yang sangat dipengaruhi oleh lamanya ikatan perkawinan.



Gambar 3. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2017

Menurut status perkawinannya, penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2017 yang berstatus kawin sebanyak 54,60 persen; belum kawin 34,19 persen; cerai hidup 3,17 persen; dan cerai mati 8,04

persen. Persentase penduduk Kabupaten Pinrang yang berstatus kawin untuk laki-laki adalah 54,88 persen, lebih besar dibandingkan persentase perempuan yaitu 54,34 persen. Demikian pula untuk penduduk yang belum kawin, persentase penduduk laki-laki belum kawin (39,40 persen) lebih besar dibanding perempuan belum kawin (29,41 persen). Sementara itu, persentase penduduk perempuan yang berstatus cerai hidup maupun cerai mati lebih besar dibanding penduduk laki-laki dengan status sama.

Persentase penduduk perempuan berstatus cerai mati dan cerai hidup lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Sedangkan untuk yang berstatus kawin, persentase laki-laki kawin lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini menunjukkan fenomena bahwa laki-laki yang telah cerai hidup ataupun cerai mati, tidak berselang lama kemudian menikah kembali sedangkan perempuan lebih banyak yang mempertahankan status jandanya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Fenomena lain yang tampak dari data diatas adalah perempuan lebih cepat menikah dari pada laki-laki yang ditunjukkan oleh persentase perempuan berstatus belum kawin lebih kecil dibandingkan laki-laki.

3.2 Umur Kehamilan Pertama

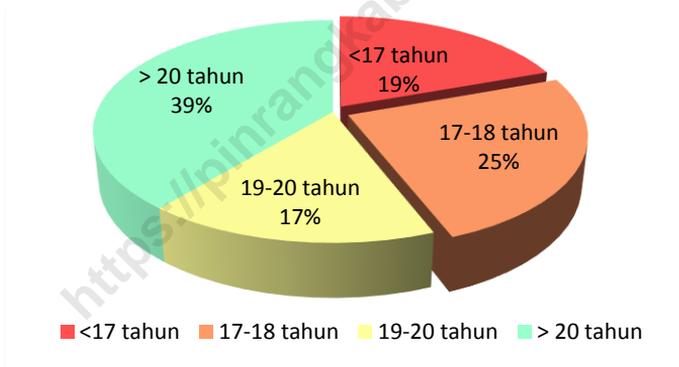
Laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh tingkat fertilitas yang erat kaitannya dengan umur perkawinan pertama.

Umur perkawinan pertama sebagai umur pertama kali menikah menandakan dimulainya masa reproduksi, karena tentunya kehamilan akan terjadi setelah perkawinan. Terdapat pengaruh antara umur perkawinan pertama dengan tingkat fertilitas. Semakin muda umur perkawinan pertama seorang perempuan, maka semakin tinggi pula fertilitas perempuan tersebut karena masa konsepsi yang semakin panjang.

Indikator umur kehamilan pertama pada perempuan penting bagi penentuan kebijakan yang terkait kependudukan terutama untuk program-program peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga. Kehamilan pada umur terlalu muda akan berdampak pada kualitas keluarga serta resiko kesehatan dalam kehamilan dan persalinan. Data mengenai jumlah pasangan usia subur (persentase perempuan usia subur yang menikah) juga akan memudahkan perencanaan program KB untuk mempersiapkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.

Sebagian besar perempuan yang pernah hamil di Kabupaten Pinrang dengan perkawinan pertama kali umur diatas 20 tahun yaitu sebanyak 39 persen. Selanjutnya, persentase perempuan di Kabupaten Pinrang yang pernah hamil dan umur perkawinan pertama kalinya pada umur 19 sampai 20 tahun yaitu 17 persen, kemudian umur 17-18 tahun adalah 25 persen. Fenomena perkawinan di bawah umur (kurang dari 17 tahun) masih terjadi di

Kabupaten Pinrang. Sebesar 19 persen perempuan yang pernah hamil, dengan perkawinan pertama kali dibawah umur 16 tahun ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa aturan yang digalakkan pemerintah masih belum ditaati sepenuhnya baik oleh masyarakat, maupun oleh instansi penyelenggara perkawinan. Sehingga diperlukan penyuluhan yang lebih intensif serta kesadaran masyarakat itu akan pentingnya ditetapkan batasan umur tersebut.



Gambar 4. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Hamil Menurut Umur Perkawinan Pertama di Pinrang Tahun 2017

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun, sedangkan menurut Undang-undang Perlindungan Anak usia minimal perempuan untuk menikah adalah 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN) umur ideal bagi perempuan untuk menikah adalah 21-25 tahun. Perkawinan pada rentang usia ini, lebih baik dari sisi kesehatan reproduksi maupun mental. Pada usia tersebut, organ-organ reproduksi perempuan dianggap lebih siap untuk menghadapi resiko persalinan, serta lebih siap mental untuk merawat dan membesarkan anaknya tersebut.

3.3 Pemakaian Alat/Cara KB

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dilakukan dengan cara menekan angka fertilitas melalui program Keluarga Berencana (KB). Program KB memberikan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi serta pentingnya pengaturan jarak kehamilan dan pengendalian jumlah kelahiran dengan menggunakan alat/cara kontrasepsi. Alat/cara kontrasepsi dapat digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Namun, di Indonesia mayoritas pengguna alat/cara kontrasepsi mayoritas adalah perempuan.

Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi adalah angka yang menunjukkan banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan alat/cara kontrasepsi pada saat pencacahan dibandingkan dengan seluruh PUS di suatu wilayah. Informasi tentang besarnya prevalensi KB sangat bermanfaat untuk menetapkan kebijakan pengendalian kependudukan serta penyediaan pelayanan KB baik dalam bentuk mempersiapkan

pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan konseling untuk menampung kebutuhan dan menanggapi keluhan pemakaian kontrasepsi.

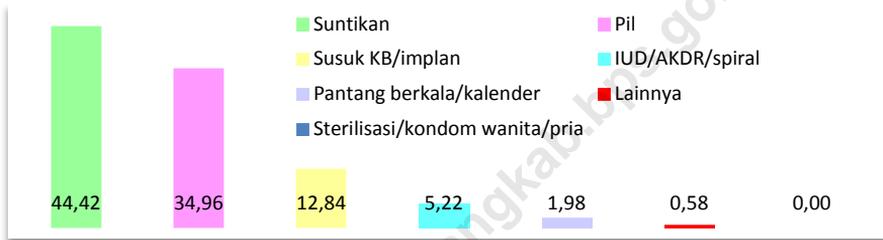


Gambar 5. Persentase penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin menurut partisipasi KB, 2017

Mayoritas wanita pernah kawin (WPK) di Kabupaten Pinrang pernah dan sedang menggunakan alat kontrasepsi (62,16 persen), sementara sisanya yaitu 37,84 persen tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas PUS di Kabupaten Pinrang menyadari akan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan maupun membatasi jumlah kelahiran. Sebanyak 45,89 persen WPK masih menggunakan alat/cara kontrasepsi hingga saat ini.

Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 adalah 45,89 persen. Hal ini berarti sekitar 45

sampai 46 dari 100 PUS menggunakan alat kontrasepsi. Alasan WPK yang sedang tidak ber-KB diantaranya karena telah menginjak masa menopause sehingga tidak akan mungkin hamil lagi atau karena pasangannya tidak tinggal di Kabupaten Pinrang (Susenas, 2017).



Gambar 6. Prevalensi Pemakaian Alat/Cara KB Perempuan Berstatus Kawin Umur 15-49 Tahun 2017

Gambar 6 menampilkan jenis alat kontrasepsi yang digunakan oleh WPK yang sedang KB. Jenis alat kontrasepsi yang paling banyak dipakai di Kabupaten Pinrang adalah suntikan KB yaitu 44,42 persen WPK. Suntik KB dinilai sebagai alat kontrasepsi yang mudah penggunaannya, karena disuntikkan hanya satu kali setiap 3 bulan atau setiap bulan.

Alat kontrasepsi kedua yang digemari adalah pil KB. pil KB juga termasuk aman dan mudah digunakan, harganya terjangkau, serta efektif mencegah kehamilan. Pil KB digunakan oleh 34,96 persen WPK. Sementara itu, sebanyak 12,84 persen WPK menggunakan

susuk KB, 5,22 persen menggunakan IUD/AKDR/Spiral. Keempat jenis alat kontrasepsi tersebut termasuk kontrasepsi sementara sedangkan sterilisasi wanita/MOW/tubektomi, serta sterilisasi pria/MOP/Vasektomi merupakan jenis kontrasepsi permanen. Tahun 2017 muncul 1,98 persen WPK yang menggunakan cara kontrasepsi Pantang Berkala/kalender. Pantang Berkala merupakan cara KB, tidak menggunakan alat apapun untuk dikonsumsi atau dipakai pada alat reproduksi. PUS hanya perlu menggunakan kalender untuk menandai kapan masa subur dan tidak subur WPK sehingga PUS dapat melakukan hubungan ketika masa tidak subur untuk memperkecil resiko hamil. Metode ini efektif digunakan jika WPK memiliki siklus menstruasi yang teratur. PUS yang ingin menggunakan cara KB ini memerlukan pengetahuan yang cukup baik untuk memahami metode ini, sehingga dapat berhasil dengan baik. Sementara itu, sebesar 0,58 persen WPK menggunakan alat/cara KB lainnya. Yang dimaksud lainnya adalah alat KB tradisional, seperti meminum jamu, menggunakan benda tertentu yang dipercayai mencegah kehamilan (Susenas 2017).

MOP adalah Metoda Operasi Laki-laki atau Vasektomi yang dilakukan dengan cara operasi pemotongan atau memutuskan saluran sperma pada laki-laki, sehingga pasangannya tidak akan mengalami kehamilan. PUS yang telah menggunakan MOP/Vasektomi dan MOW/Tubektomi akan secara permanen

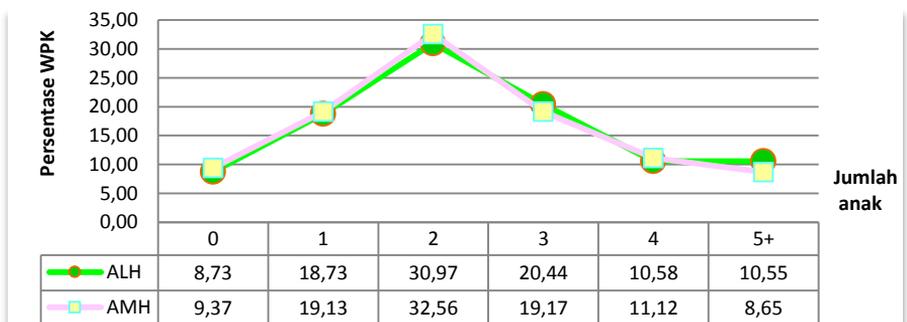
tidak memiliki keturunan lagi. Biasanya, jenis kontrasepsi ini dipilih oleh PUS yang telah merasa cukup dengan jumlah anak yang dimilikinya serta tidak berniat menambah anak lagi. Atau terpaksa dilakukan oleh PUS disebabkan penyakit tertentu yang menjangkit organ reproduksinya.

Pada umumnya, masyarakat familiar dengan istilah KB Suntik, Pil, Susuk, Spiral, Steril dan Kondom saja. Besarnya persentase pengguna suntik dan pil dikarenakan masyarakat takut karena efek samping yang ditimbulkan oleh susuk dan spiral, seperti jarum tertanam di dalam kulit, atau spiral terlepas didalam vagina. Selain itu, untuk kondom sendiri masyarakat meragukan keampuhannya, dikarenakan kurang efektif dalam mencegah kehamilan. Tahun 2017 sudah ada peningkatan dalam persentase masyarakat pengguna cara KB yang dahulu belum banyak dikenal masyarakat, yaitu pantang berkala/kalender. Sedangkan senggama terputus yang juga cara KB masih belum digunakan oleh PUS di Kabupaten Pinrang. Kedua cara KB ini tidak memiliki efek samping apapun dibandingkan penggunaan alat-alat KB seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Mayoritas pengguna cara ini adalah masyarakat yang memiliki pendidikan cukup tinggi, karena diperlukan pemahaman lebih untuk menerapkan sistem ini agar dapat berjalan dengan efektif. Tentunya peran pemerintah terutama kementerian kesehatan sangat diharapkan untuk memberikan sosialisasi serta pemahaman mengenai jenis-jenis

alat/cara KB serta cara penggunaan alat/cara KB secara benar dan efektif, agar tidak ada lagi alasan tidak ber-KB dikarenakan tidak mengetahui, tidak berhasil mencegah kehamilan ataupun takut efek samping menggunakan alat/cara KB tertentu.

3.4 Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH)

Gambar 7 menunjukkan persentase WPK menurut jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) yang ditunjukkan oleh titik berwarna hijau dan Anak Masih Hidup (AMH) yang ditunjukkan oleh titik berwarna merah muda. Secara umum terlihat bahwa kurva ALH dan AMH posisinya terus menerus beriringan. Kurva naik pada jumlah anak 0 ke 1 dan 1 ke 2, kemudian semakin menurun seiring bertambahnya jumlah anak lahir hidup.



Gambar 7. Persentase Perempuan Pernah Kawin (WPK) Menurut Jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH), Tahun 2017

Semakin besar jarak ALH dan AMH menunjukkan semakin besar pula tingkat mortalitas/kematian di suatu wilayah pada waktu tertentu. Sebagai contoh, persentase WPK yang tidak memiliki Anak Lahir Hidup (ALH nol) adalah 8,73 persen. Sedangkan untuk WPK yang tidak memiliki Anak Masih Hidup (AMH nol) persentasenya 9,37 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 0,64 persen WPK yang melahirkan satu anak (ALH 1) dan kemudian meninggal dunia sehingga tidak memiliki anak lagi. Sementara ALH 1 dengan persentase 18,73 persen mengalami peningkatan sehingga AMH 1 menjadi 19,13 persen disebabkan oleh kematian 0,4 persen anak dari WPK yang memiliki jumlah anak 2, dst.

Persentase WPK yang memiliki 2 anak menempati puncak tertinggi, baik ALH (30,97 persen) maupun AMH (32,56 persen). Sementara itu, WPK dengan jumlah anak 1 dan 3 menempati jumlah yang hampir sama, yaitu jumlah anak 1 sebesar 18,73 persen (ALH) dan 19,13 persen (AMH); sedangkan jumlah anak 3 sebesar 20,44 persen (ALH) dan 19,17 persen (AMH). Jika dirata-ratakan, maka setiap WPK berumur 15-49 tahun memiliki 1-2 ALH (1,79). Hal ini menunjukkan keberhasilan program KB karena mayoritas WPK telah menerapkan program 2 anak cukup yang dilakukan berkat kerjasama masyarakat dan pemerintah. Atau kemungkinan yang lain adalah terjadinya kematian ALH pada WPK dengan jumlah anak kurang dari 2 atau lebih dari dua.

<https://pinrangkab.bps.go.id>



Pendidikan

DI KABUPATEN PINRANG

TAHUN 2017



11,90 %
BUTA HURUF

VS



88,10 %
MELEK HURUF

MELEK HURUF berarti memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya tanpa harus mengerti makna kalimat yang dibaca dan ditulis

Tidak
punya
IJAZAH

21,75 %

IJAZAH
SD/MI

29,98 %

IJAZAH
SMP/MTS

18,54 %

IJAZAH
SMA

17,15 %

Ijazah Tertinggi

yang Dimiliki

Mayoritas
Penduduk
Pinrang
Berpendidikan
Rendah (SD-SMP)

4,06 %

IJAZAH
SMK



0,59 %

IJAZAH
DI/II

1,03 %

IJAZAH
DIII

6,9 %

IJAZAH
DIV/S1/S2/S3

Sumber : SUSENAS 2017



Bab IV

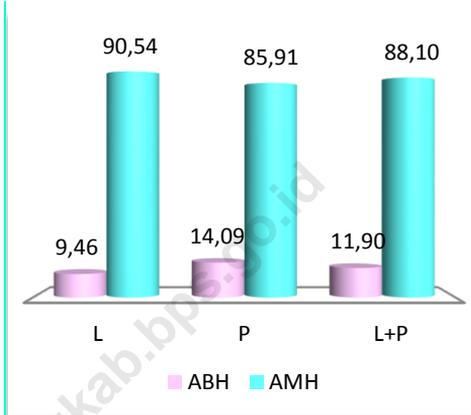
Pendidikan

Pendidikan menjadi kunci utama bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Penyebab mendasar terjadinya keterbelakangan adalah kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah di suatu wilayah akan menghambat peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, politik dan kultural secara lebih efektif (Sen, 1999). Oleh sebab itu, pembangunan manusia dalam bidang pendidikan perlu ditingkatkan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Menyadari pentingnya pendidikan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa yang bermartabat, maka dalam pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk meraih tujuan ini ditempuh dengan membentuk berbagai macam program pendidikan, seperti wajib belajar sembilan tahun, program kejar paket A, paket B, paket C, dan sebagainya. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan pada masa mendatang pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik sehingga kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dapat terwujud.

4.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Tujuan nasional pendidikan adalah memberantas buta huruf. Indikator keberhasilannya adalah menurunnya angka buta huruf atau dengan kata lain meningkatnya angka melek huruf. Definisi melek huruf adalah kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin maupun huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulis.



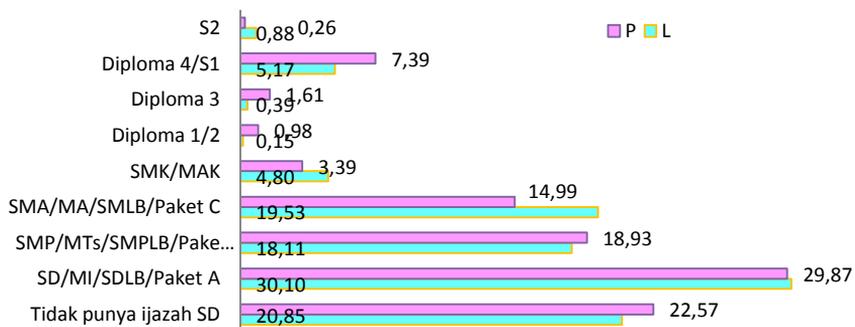
Gambar 8. Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2017

Indikator Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin dan atau huruf lainnya terhadap keseluruhan penduduk usia 15 tahun ke atas. Kemampuan membaca dan menulis merupakan indikator dasar untuk mengukur tingkat pendidikan di suatu wilayah karena membaca dan menulis merupakan dasar utama untuk memperluas pengetahuan. AMH juga menjadi tolok ukur keberhasilan program pengentasan buta huruf yang digalakkan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Secara umum AMH Kabupaten Pinrang tahun 2017 (88,10 persen) menurun dibandingkan tahun 2016 (91,47 persen) sebesar 3,37 persen. Hal ini menunjukkan pemberantasan buta huruf mengalami penurunan. Sementara itu, berdasarkan jenis kelaminnya, AMH laki-laki (90,54 persen) lebih besar daripada perempuan (85,91 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi laki-laki yang melek huruf lebih tinggi dibandingkan proporsi perempuan melek huruf.

4.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin bagus kualitas sumber daya manusianya. Sehingga potensi sumber daya manusia dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan.



Gambar 9. Persentase Ijazah/STTB yang dimiliki Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin, 2017

Berdasarkan Gambar 9 terlihat bahwa mayoritas penduduk berumur 15 tahun ke atas memiliki ijazah tertinggi SD/MI/SDLB/Paket A. Diurutan kedua terbesar yaitu SMA/MA/SMLB/Paket C, sedangkan urutan ketiga adalah Tidak memiliki ijazah SD. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Pinrang memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Meskipun persentase ABH cukup rendah, akan tetapi kualitas pendidikan masih sangat kurang.

Tabel 3. Persentase Ijazah/STTB yang dimiliki Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin, 2017

STTB Tertinggi yang dimiliki	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak punya ijazah SD	20,85	22,57	21,75
SD/MI/SDLB/Paket A	30,10	29,87	29,98
SMP/MTs/SMPLB/Paket B	18,11	18,93	18,54
SMA/MA/SMLB/Paket C	19,53	14,99	17,15
SMK/MAK	4,80	3,39	4,06
Diploma 1/2	0,15	0,98	0,59
Diploma 3	0,39	1,61	1,03
Diploma 4/S1	5,17	7,39	6,34
S2	0,88	0,26	0,56
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas, 2017

Menurut Tabel 3, persentase laki-laki yang bersekolah lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini terlihat dari persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah SD untuk perempuan 22,57 persen sedangkan laki-laki 20,85 persen. Selain itu, laki-laki yang memiliki ijazah tertinggi SMK/MAK juga lebih besar dari perempuan karena laki-laki memiliki orientasi untuk cepat bekerja setelah lulus sekolah menengah.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

KESEHATAN Penduduk Pinrang Tahun 2017



28,22 %



Penduduk Pinrang punya
Keluhan Kesehatan 1
bulan terakhir



71,78 %

Penduduk Pinrang Tidak ada
Keluhan Kesehatan 1 bulan
terakhir



100%
SELURUH PERSALINAN
DITOLONG TENAGA MEDIS



4,78%
BAYI TIDAK PERNAH
DIBERI ASI



24,44%
BAYI TIDAK DIIMUNISASI

Bab V

Kesehatan

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari jiwa dan raga serta kehidupan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif. Masyarakat yang semakin sehat berarti produktifitasnya semakin meningkat. Hal ini akan sangat mendukung proses dan dinamika pembangunan di suatu wilayah.

Guna meningkatkan kesehatan masyarakat, berbagai upaya dilakukan pemerintah baik melalui pembangunan sarana-prasarana kesehatan maupun penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Upaya melalui pendidikan formal diantaranya adalah penerapan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Program-program pembangunan pemerintah di bidang kesehatan berusaha meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga setiap penduduk dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Hal ini dilakukan dengan pembangunan rumah sakit, puskesmas, polindes, BKIA,

posyandu serta pemenuhan kebutuhan akan tenaga kesehatan dan obat-obatan

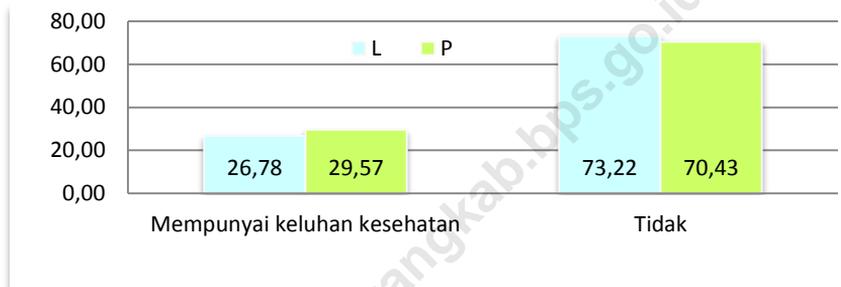
5.1 Angka Kesakitan/Morbiditas

Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Konsep yang digunakan dalam Susenas, seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada saat pencacahan orang yang bersangkutan sedang tidak kambuh penyakitnya. Semakin besar angka kesakitan menunjukkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah semakin rendah.



Gambar 10. Persentase Keluhan Kesehatan yang Diderita Selama Sebulan Terakhir, 2017

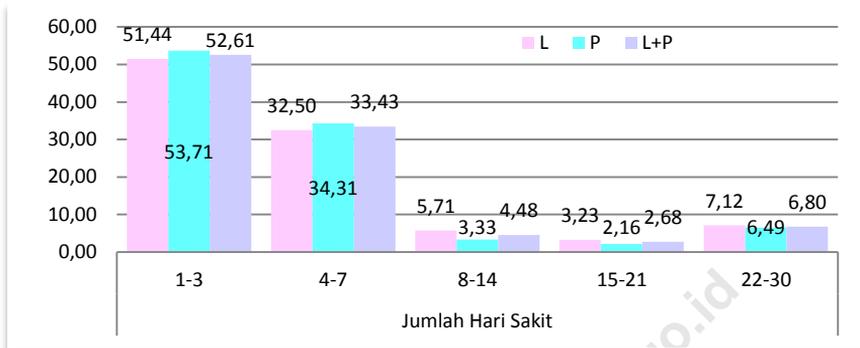
Gambar 10 menunjukkan 28,22 persen penduduk Kabupaten Pinrang mempunyai keluhan kesehatan. Sehingga angka kesakitan atau morbiditas untuk Kabupaten Pinrang tahun 2017 adalah 28,22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat/derajat kesehatan masyarakat secara umum sudah cukup baik.



Gambar 11. Persentase Jenis Keluhan Kesehatan yang Diderita Penduduk Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin, 2017

Gambar 11 menunjukkan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan menurut jenis kelamin pada tahun 2017. Perempuan lebih banyak mengalami keluhan kesehatan daripada Laki-laki. Terlihat bahwa persentase perempuan yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 29,57 persen sementara laki-laki sebesar 26,78 persen.

Berdasarkan Gambar 12, terlihat bahwa secara umum, keluhan kesehatan yang diderita oleh penduduk Pinrang kurang dari 4 hari baik untuk laki-laki maupun perempuan.



Gambar 12. Persentase Penduduk yang Menderita Gangguan Kesehatan Sebulan yang Lalu Menurut Lamanya Hari Gangguan Kesehatan, Jenis Kelamin, 2017

5.2 Penolong Persalinan

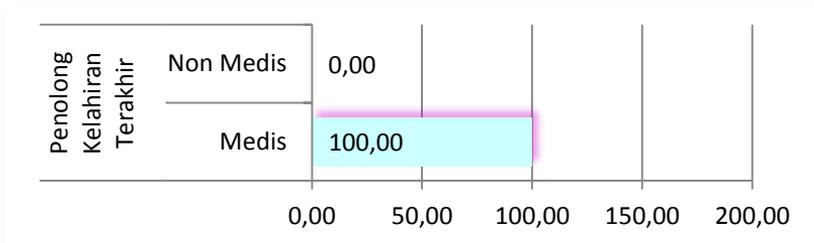
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan barometer pelayanan kesehatan di suatu wilayah. AKI dan AKB erat kaitannya dengan ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, dalam upaya menurunkan AKI dan AKB, Indonesia menerapkan program safe motherhood dengan pilar utamanya adalah persalinan aman yang ditolong oleh tenaga kesehatan.

Pada pengumpulan data Susenas, diperoleh informasi tentang penolong kelahiran pertama dan penolong kelahiran terakhir. Penolong kelahiran pertama adalah orang yang membantu proses persalinan pertama kali. Sedangkan penolong kelahiran terakhir adalah orang yang membantu proses persalinan hingga bayi

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pinrang 2018

dilahirkan. Penolong persalinan pertama dan terakhir dapat berbeda jika penolong kelahiran pertama menemukan masalah dalam persalinan yang tidak dapat ditangani sehingga membutuhkan bantuan untuk penanganan lebih lanjut dalam menangani proses persalinan. Oleh sebab itu, pada umumnya penolong kelahiran terakhir memiliki kemampuan dalam penanganan persalinan yang lebih baik dibandingkan penolong persalinan pertama.

Informasi mengenai penolong kelahiran diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan kesehatan telah menjangkau masyarakat. Standar pelayanan minimal kesehatan 2010-2017 mensyaratkan 90 persen pertolongan persalinan dilakukan oleh Tenaga Medis yang memiliki kompetensi kebidanan.

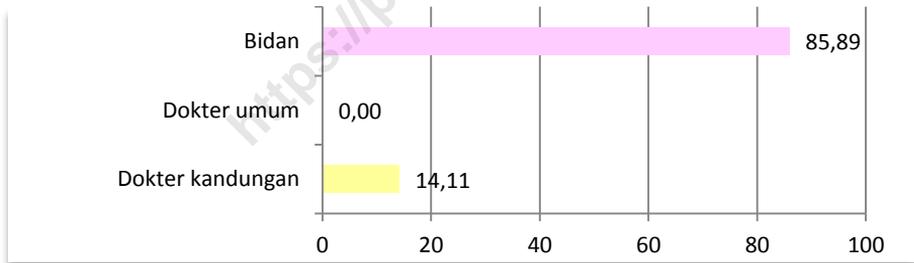


Gambar 13. Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, 2017

Data tahun 2017 menunjukkan bahwa di Kabupaten Pinrang target pelayanan minimal kesehatan 90 persen sudah tercapai.

Seluruh persalinan di Kabupaten Pinrang telah dilakukan oleh penolong kelahiran terakhir tenaga medis.

Persentase tertinggi penolong persalinan adalah Bidan yaitu 85,89 persen sebagai penolong kelahiran terakhir. Hal ini disebabkan adanya penugasan Bidan desa yang dapat menjangkau lokasi yang terpencil sekalipun. Yang harus menjadi perhatian adalah masih rendahnya persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh dokter karena jumlah dokter, terutama dokter spesialis kandungan di Kabupaten Pinrang masih terbatas. Persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh dokter kandungan sebagai penolong kelahiran terakhir adalah sebesar 14,11 persen.



Gambar 14. Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, 2017

5.3 Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

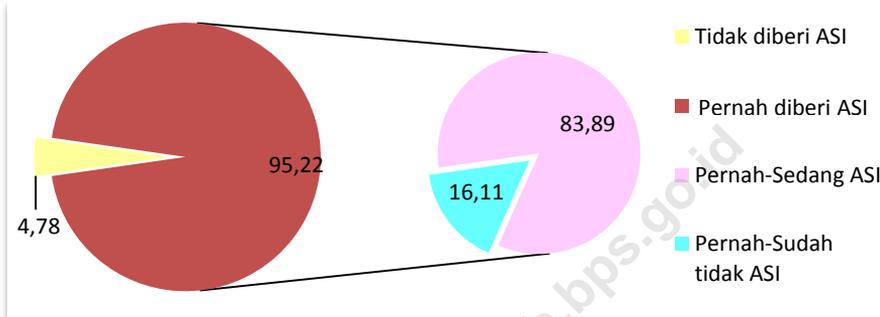
ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung gizi lengkap yang diperlukan bagi tumbuh kembang bayi. Pemberian ASI pada bayi memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi untuk

tumbuh kembang bayi tetapi juga memberi kekebalan terhadap berbagai macam penyakit. Oleh karena itu pemerintah menganjurkan setiap ibu untuk memberikan ASI eksklusif yaitu memberikan ASI kepada bayi sejak dilahirkan sampai menginjak usia enam bulan tanpa makanan dan minuman pralakteal lainnya seperti air gula, air mineral, madu dan sebagainya.

Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan dapat mencegah anak dari risiko alergi dan asma. Selain itu ASI merupakan sumber lemak dan vitamin A yang tidak akan tergantikan oleh makanan sapihan apapun. Selanjutnya pemberian ASI tetap dilanjutkan sampai usia dua tahun bersama pemberian makanan tambahan. Banyak ibu yang meragukan kemampuan ASI-nya ketika menginjak tahun kedua menyusui. Padahal pada saat itu, kandungan faktor imunitas ASI, kandungan lemak dan energi meningkat dalam jumlah sangat besar (UNICEF, 2009).

Berdasarkan data Susenas 2017 (Gambar 15), diketahui bahwa 4,78 persen balita umur 0-23 bulan tidak pernah diberi ASI oleh ibunya, sementara sisanya 95,22 persen balita usia 0-23 bulan mendapatkan ASI dari ibunya. Hal ini berarti bahwa masih ada ibu yang tidak dapat menyusui bayinya, baik karena alasan ASI tidak berproduksi, maupun memang sengaja tidak ingin memberikan ASI kepada bayinya. Dari 95,22 persen yang pernah diberi ASI, sebanyak 83,89 persennya masih mendapat ASI sampai saat

pencacahan berlangsung, sedangkan 16,11 persen balita sudah tidak mendapatkan ASI lagi.

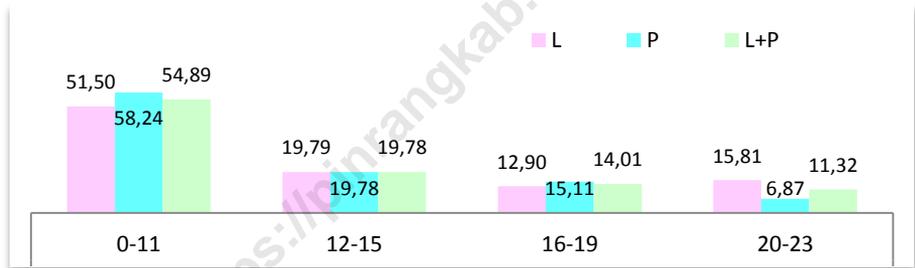


Gambar 15. Persentase Balita umur 0-23 bulan Menurut Pemberian Air Susu Ibu (ASI), 2017

Balita mulai memerlukan MP-ASI setelah usia 6 bulan. Akan tetapi hingga tepat berumur 2 tahun, ASI juga masih tetap disarankan untuk diberikan kepada balita agar balita mendapatkan nutrisi yang mencukupi dalam masa tumbuh kembangnya. Menurut lama pemberian ASI-nya, sebagian besar bayi disusui kurang dari satu tahun (54,89 persen) dan hanya sebagian kecil saja (11,32 persen) yang mendapat ASI lengkap hingga berusia hampir 24 bulan.

Balita seharusnya mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, maksudnya hanya diberikan ASI tanpa makanan tambahan yang lain. Akan tetapi, di daerah-daerah pedesaan, masih ada ibu yang memberikan selain ASI pada bayinya yang berusia 0-6 bulan. Hal

ini berarti pemahaman masyarakat awam akan pentingnya ASI eksklusif masih cukup rendah. Selain itu, bayi berusia 0-6 bulan memiliki sistem pencernaan yang belum matang untuk menerima makanan selain ASI. Pemberian MPASI sebelum usia 6 bulan diperbolehkan hanya jika mengalami sebab-sebab tertentu. Misalnya, pertumbuhan berat dan tinggi badan bayi tidak sesuai dengan kurva pada KMS, atau ibu tidak mampu memproduksi ASI yang cukup untuk bayinya, dan seterusnya.

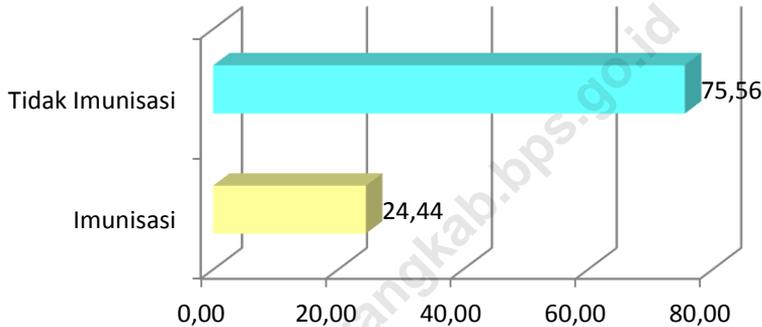


Gambar 16. Persentase penduduk berumur 0-23 bulan menurut lama pemberian ASI, 2017

5.4 Imunisasi

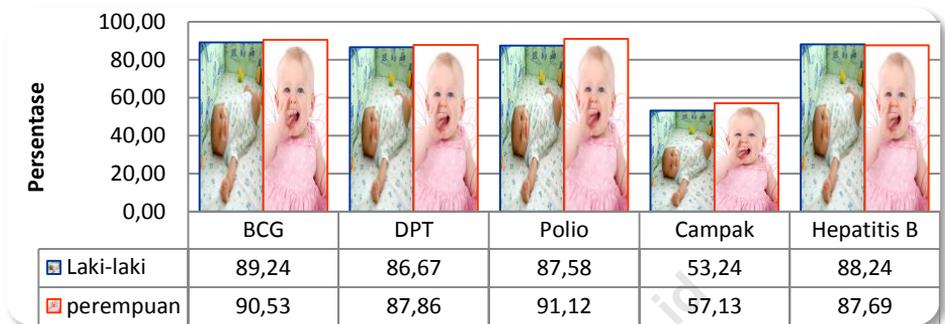
Imunisasi merupakan investasi kesehatan masa depan. Pencegahan penyakit melalui imunisasi merupakan cara perlindungan paling efektif, terutama dari segi pembiayaan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Program imunisasi nasional pada anak sangat efektif mencegah penyakit dan kematian dari penyakit menular seperti campak, polio dan meningitis. Namun demikian,

sampai saat ini masih terdapat masalah-masalah dalam pemberian imunisasi, antara lain pemahaman orang tua yang masih kurang, mitos yang salah tentang imunisasi, serta jadwal imunisasi yang terlambat.



Gambar 17. Persentase Balita Menurut Pemberian Imunisasi, 2017

Sebesar 75,56 persen balita di Kabupaten Pinrang mendapatkan imunisasi lengkap, sementara 24,44 persen balita tidak diimunisasi lengkap. Alasan yang dikemukakan orang tua untuk tidak memberikan imunisasi sebagian besar karena anak sering sakit (misalnya demam dan batuk/pilek) setelah diberikan imunisasi, dan masih ada yang menyatakan karena cemas/takut dan tidak tahu (Juniatiningsih dan Soediby, 2007).



Gambar 18. Persentase penduduk berumur 0-59 bulan menurut jenis imunisasi, 2017

Jenis imunisasi yang paling sedikit diberikan kepada anak adalah imunisasi campak, pada anak laki-laki sebesar 53,24 persen, dan anak perempuan 57,13 persen. Sedangkan untuk jenis imunisasi yang lain, persentase cakupannya berada diatas 80 persen. Penyebab rendahnya cakupan imunisasi campak salah satunya disebabkan karena Kabupaten Pinrang memiliki beberapa wilayah yang cukup terpelosok, sulit dijangkau dengan tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat akan imunisasi yang masih rendah.

KETENAGAKERJAAN

2017

setiap 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 58-59 orang yang termasuk angkatan kerja (Bekerja dan Pengangguran)

**TPAK
Pinrang
58,35 %**

Menurut Jenis Kelamin



80,26 %



38,54 %

Menurut Wilayah



60,01 %



57,65%

Pengangguran



4,41 %

pada tahun 2017 di Kabupaten Pinrang dari 100 penduduk berumur 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), sebanyak 4 sampai 5 orang merupakan pengangguran

Menurun

Yang termasuk Pengangguran:

- orang yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan
- orang yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha
- orang yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
- orang yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja

Pengangguran
Di **PERKOTAAN LEBIH TINGGI**
daripada Di Perdesaan

2,57 %



1,84 %

Sumber:
Sakernas 2017

Bab VI

Ketenagakerjaan

Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan, di samping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan adalah isu pengangguran. Dari sisi ekonomi, pengangguran muncul sebagai akibat kesenjangan antara SDM dengan SDA dan ketersediaan lapangan kerja. Jumlah tenaga kerja semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk sedangkan lapangan kerja yang tersedia terbatas, akibatnya pengangguran semakin meningkat. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah di bidang ekonomi melainkan juga di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.

Untuk mengatasi persoalan pengangguran, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja sesuai pertumbuhan angkatan kerja dengan mendorong pertumbuhan industri yang banyak menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas SDM agar memenuhi kebutuhan industri, serta mendorong masyarakat memiliki jiwa *entrepreneurship* sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Data dan informasi ketenagakerjaan diperlukan oleh penentu kebijakan untuk menyusun strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Bab ini menjelaskan beberapa indikator ketenagakerjaan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi terkini ketenagakerjaan di Kabupaten Pinrang dan bersumber dari bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2017.

6.1 Konsep Ketenagakerjaan

Konsep dalam bidang ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS membagi penduduk menjadi dua kelompok besar yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja meliputi penduduk yang bekerja dan pengangguran. Termasuk dalam kelompok bekerja adalah penduduk usia kerja yang statusnya bekerja, dan sementara tidak bekerja (karena menunggu panen, sedang cuti atau sedang menunggu pekerjaan berikutnya).

Menurut jam kerjanya, penduduk bekerja dibedakan menjadi penduduk yang bekerja sesuai jam kerja normal yaitu minimal 35 jam per minggu dan mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, atau disebut setengah menganggur. Penduduk yang

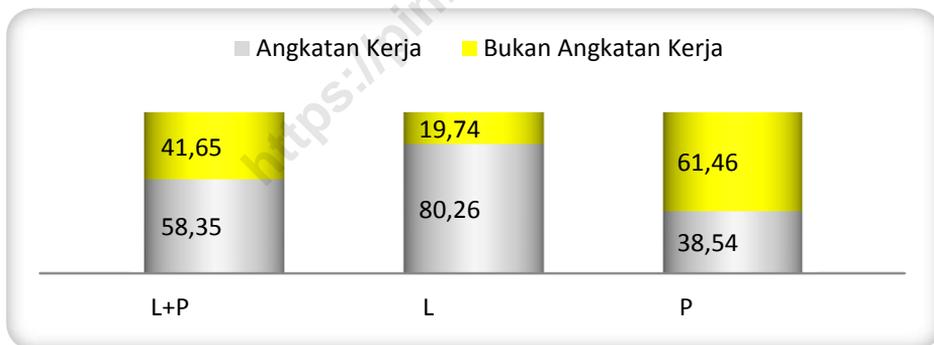
termasuk dalam kelompok pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan ataupun mempersiapkan suatu usaha. Termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya bersekolah atau mengurus rumah tangga. Lebih jelasnya, klasifikasi penduduk dalam konsep ketenagakerjaan dijelaskan dalam diagram berikut.



Gambar 19. Diagram Ketenagakerjaan, BPS

6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja (15 tahun keatas). TPAK adalah salah satu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian.



Gambar 20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Total, serta Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2017

Berdasarkan gambar 20, dari keseluruhan penduduk usia kerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 sebanyak 58,35 persen adalah angkatan kerja, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 41,65 persen

bukan termasuk angkatan kerja. Dari keseluruhan bukan angkatan kerja, terdapat sebanyak 69,22 persennya adalah penduduk yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sementara yang bersekolah terdapat sebanyak 19,73 persen dan lainnya sebanyak 11,05 persen. Lainnya disini termasuk yang berada dalam usia kerja tetapi tidak dapat bekerja karena cacat dsb.

TPAK Kabupaten Pinrang tahun 2017 (Gambar 20) adalah 58,35 persen, artinya dari setiap 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 58 orang yang termasuk angkatan kerja. Angka ini meningkat 2,05 persen dibandingkan tahun 2015 (56,30 persen). Sementara itu, menurut jenis kelaminnya, TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan yaitu 80,26 persen untuk laki-laki dan 38,54 persen untuk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar laki-laki usia 15 tahun ke atas aktif secara ekonomi dengan bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sebaliknya, perempuan lebih banyak yang termasuk dalam bukan angkatan kerja karena menjadi ibu rumah tangga.

Berdasarkan klasifikasi wilayahnya, TPAK di Kabupaten Pinrang tahun 2017 untuk daerah perkotaan lebih tinggi (60,01 persen) dibandingkan TPAK pedesaan (57,65 persen). Hal ini sejalan dengan kondisi tahun 2015, dimana TPAK wilayah perkotaan lebih tinggi dari wilayah pedesaanan. TPAK untuk wilayah perkotaan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 58,77 persen

pada tahun 2015 menjadi 60,01 persen pada tahun 2017. Demikian sebaliknya untuk wilayah perdesaan mengalami penurunan dari 55,33 persen pada tahun 2015 menjadi 57,65 persen pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran tenaga kerja dari perdesaan ke perkotaan (urbanisasi).

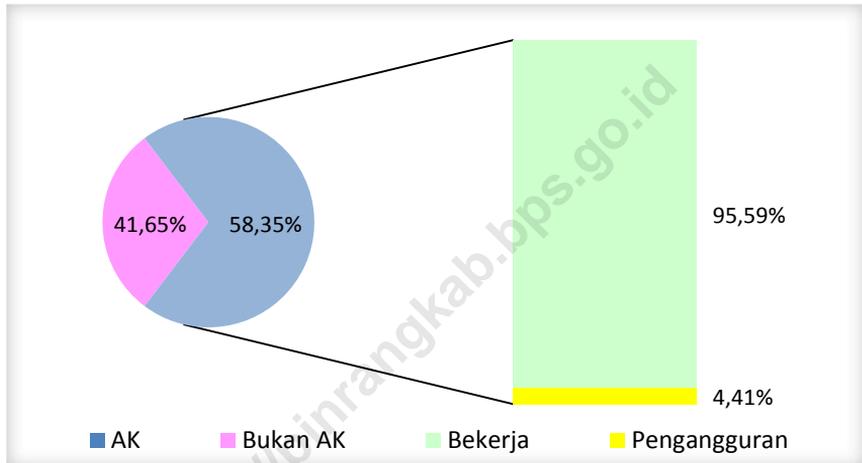
Tabel 4. TPAK Kabupaten Pinrang Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Tahun 2015-2017

Klasifikasi		2015	2017
(1)		(2)	(3)
Jenis Kelamin	Laki-laki	79,61	80,26
	Perempuan	35,27	38,54
Wilayah	Perkotaan	58,77	60,01
	Perdesaan	55,33	57,65

6.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Gambar 21 menunjukkan dari seluruh penduduk Kabupaten Pinrang 41,65 persen termasuk bukan angkatan kerja, yaitu penduduk yang masih berstatus sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Dari 58,35 persen angkatan kerja, sebesar 95,59 persen adalah penduduk yang bekerja sedangkan 4,41 persen pengangguran. Penduduk yang bekerja meliputi penduduk yang sedang bekerja

dan sementara tidak bekerja. Sementara itu, penduduk yang menganggur meliputi pengangguran pernah bekerja, dan pengangguran tidak pernah bekerja.



Gambar 21. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Termasuk Angkatan Kerja, 2017

Angka 4,41 persen merupakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang berarti bahwa pada tahun 2017 dari 100 penduduk 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja di Kabupaten Pinrang, sebanyak 4 sampai 5 orang merupakan pengangguran. Dengan kata lain, terdapat 4,41 persen angkatan kerja di Kabupaten Pinrang yang tidak terserap dipasar kerja. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 0,42 persen. Fenomena ini menyiratkan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017.

Tabel 5. TPT Kabupaten Pinrang Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2017

Kategori		Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan / <i>Educational Attainment</i>						Jumlah
		SD ke bawah	SMP	SMA	SMK	D I / II / III Akademi	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Wilayah	Perkotaan	0,23	0,10	1,11	0,50	0,10	0,52	2,57
	Perdesaan	0,42	0,39	0,42	0,21	0,20	0,21	1,84
Jenis Kelamin	L	0,65	0,20	0,93	0,35	0,10	0,64	2,86
	P	0,00	0,29	0,60	0,36	0,20	0,09	1,55

Dari total 4,41 persen TPT Kabupaten Pinrang, sebesar 2,57 persen adalah TPT daerah perkotaan, dan 1,84 persen merupakan TPT daerah perdesaan. Tingginya TPT perkotaan dibandingkan perdesaan menunjukkan bahwa angkatan kerja di wilayah perkotaan Kabupaten Pinrang lebih banyak yang tidak terserap di pasar kerja dibandingkan angkatan kerja di perdesaan. Jika dilihat menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, TPT terbesar adalah justru pada tamatan SMA di perkotaan yaitu 1,11 persen, selanjutnya TPT Perguruan Tinggi di perkotaan 0,52 persen, kemudian TPT SMK di Perkotaan 0,5 persen.

Sementara itu, Menurut jenis kelaminnya, dari total 4,41 persen TPT Kabupaten Pinrang, sebesar 2,86 persen TPT penduduk laki-

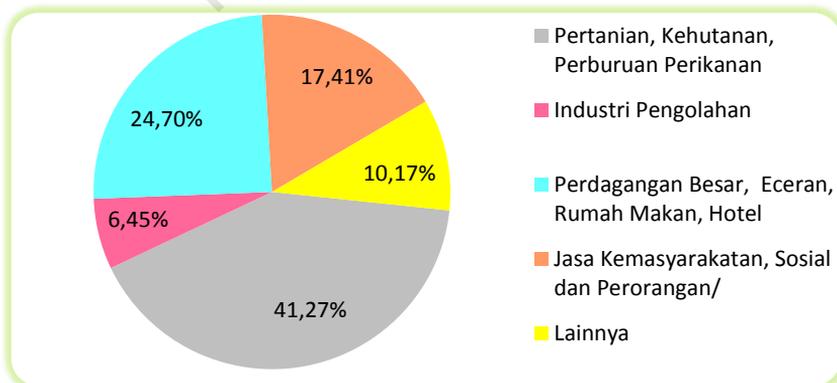
laki dan 1,55 persen TPT penduduk perempuan. Sama halnya dengan klasifikasi TPT menurut pendidikan tertingginya, jika dilihat dari jenis kelamin, penduduk perempuan yang berpendidikan SD ke bawah memiliki TPT nol. Begitu juga dengan penduduk tamatan Perguruan Tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan yang tinggi membuat orang untuk memilih pekerjaan sesuai dengan yang diminati. TPT terbesar menurut jenis kelamin adalah TPT penduduk laki-laki tamatan SMK (37,8 persen), kedua penduduk perempuan tamatan DI/II/III/Akademi (26,4 persen), ketiga laki-laki tamatan perguruan tinggi (20,8 persen), dan keempat penduduk perempuan tamatan perguruan tinggi (7,6 persen). Hal ini mengisyaratkan bahwa tamatan SMK yang diharapkan langsung dapat bekerja justru malah banyak yang menganggur.

Banyaknya penduduk laki-laki yang tidak bekerja disebabkan oleh banyak hal, baik karena tidak sesuai dengan bidangnya, terlalu jauh lokasinya, ketidaksesuaian dengan upah yang didapatkan, maupun karena memilih tidak bekerja dan menunggu penerimaan PNS saja. Di lain pihak, penduduk perempuan yang memilih menjadi pengangguran dikarenakan tanggung jawab menafkahi rumah tangga ada di tangan laki-laki, sehingga sebagian perempuan memutuskan menjadi ibu rumah tangga saja.

6.4 Bekerja

Konsep bekerja yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh BPS adalah bekerja minimal satu jam berturut-turut selama seminggu terakhir. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 adalah 146.463 jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 9.062 jiwa.

Distribusi penduduk yang bekerja menurut sektor utama yaitu pertanian, industri, perdagangan, jasa dan lainnya terlihat pada Gambar 23. Pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan pertanian lainnya, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Industri pengolahan meliputi pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, serta bangunan/konstruksi.



Gambar 22. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2017

Berdasarkan Gambar 22, sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 yang bekerja di sektor pertanian yaitu sebanyak 41,27 persen. Sektor dengan penyerapan tenaga kerja dari yang terbesar adalah perdagangan besar, perdagangan eceran, rumah makan dan hotel sebesar 24,70 persen. Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebanyak 17,41 persen, sementara yang bekerja di sektor lainnya sebanyak 10,17 persen dan terakhir di sektor industri pengolahan 6,45 persen.



Gambar 23. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Wilayah dan Lapangan Usaha Utama, 2017

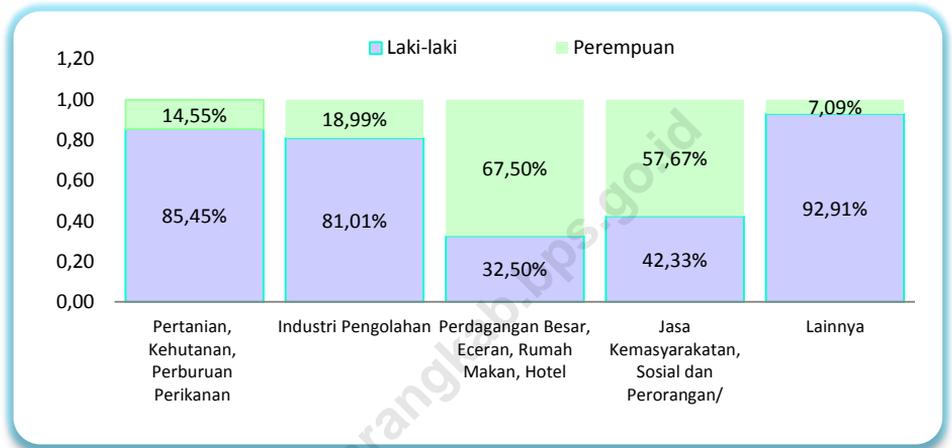
Dibandingkan kondisi tahun 2015, terdapat peningkatan distribusi tenaga kerja terutama dari sektor pertanian ke sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel. Hal ini tidak dipungkiri

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pinrang 2018

karena 2 tahun belakangan ini terdapat pembangunan beberapa hotel baru di Kabupaten Pinrang. Sebagai daerah sentra pertanian, terutama komoditi beras, sehingga sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor pertanian. Penurunan tenaga kerja di sektor pertanian adalah sebesar 12,33 persen. Hal ini disebabkan mayoritas panen padi atau biasa disebut panen raya terjadi pada bulan April pada tahun 2017. Sehingga ketika pencacahan Sakernas ini berlangsung di bulan Agustus, penduduk yang tengah bekerja disektor pertaniannya, lahan yang digunakan masih tahap vegetative awal. Sementara penduduk yang sebelumnya bekerja pada sektor pertanian belarih ke perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel untuk mencari pendapatan tambahan.

Berdasarkan wilayahnya, distribusi tenaga kerja di sektor pertanian sebagian besar berasal dari perdesaan (87,14 persen). Begitu juga dengan sektor industri pengolahan (73,86 persen), sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel (66,21 persen) serta sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Sementara itu untuk sektor lainnya mayoritas penduduk berasal dari wilayah perkotaan. Hal ini sesuai dengan karakteristik pedesaan sebagai gudangnya sektor pertanian serta industri pengolahan. Industri pengolahan di sini adalah industri pengolahan yang berhubungan dengan penggilingan padi maupun industri

rumah tangga yang memproduksi makanan ringan khas daerah Pinrang.

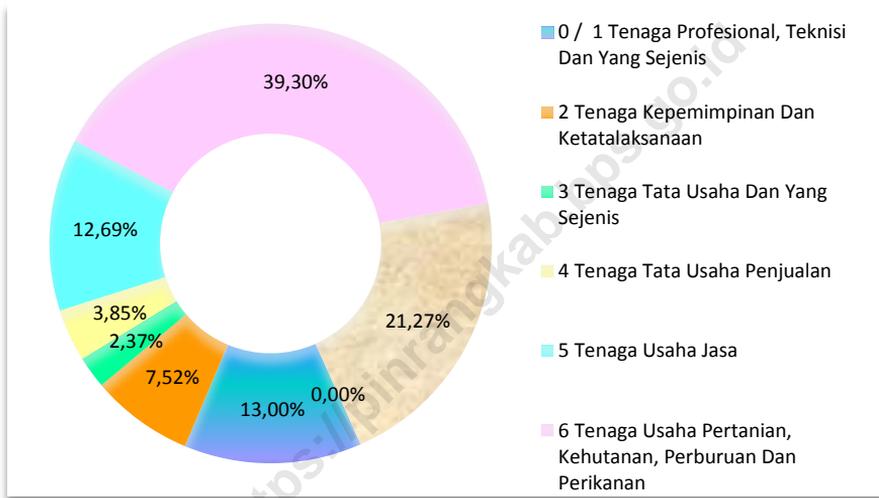


Gambar 24. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha Utama, 2017

Sementara itu, berdasarkan jenis kelaminnya, sebagian besar tenaga kerja laki-laki bekerja di sektor pertanian 85,45 persen, sektor industri pengolahan 81,01 persen, dan sektor lainnya 92,91 persen. Pekerjaan di sektor pertanian membutuhkan tenaga yang besar, mulai dari pengolahan sawah untuk persiapan penanaman hingga pemanenan, sehingga penduduk laki-laki yang bekerja di sektor pertanian jumlahnya lebih dominan dibandingkan penduduk perempuan yang hanya mencapai 14,55 persen. Sedangkan tenaga kerja perempuan lebih banyak di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel (67,50 persen) serta sektor jasa sebagian besar

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pinrang 2018

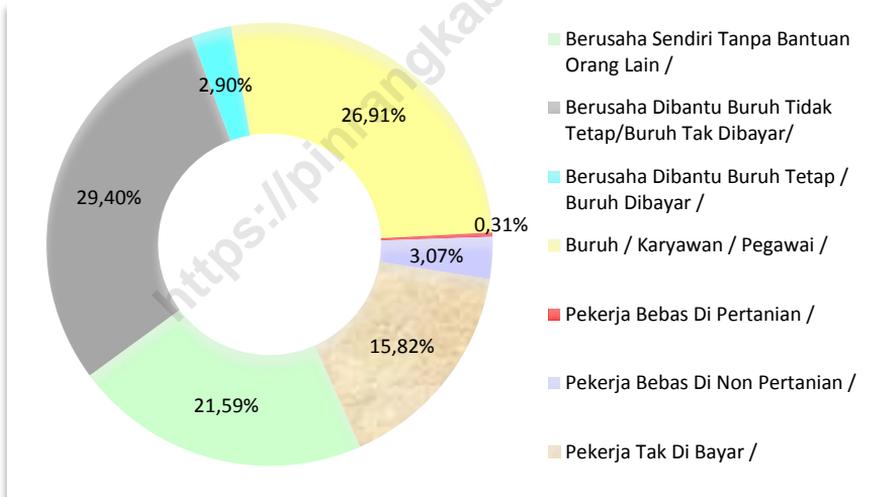
tenaga kerjanya perempuan (52,67 persen). Pekerjaan di sektor perdagangan, rumah makan, hotel dan jasa-jasa, lebih sesuai bagi perempuan karena sifat perempuan yang lebih teliti dan sabar dalam melayani pengguna jasa.



Gambar 25. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2017

Distribusi penduduk bekerja di Kabupaten Pinrang tahun 2017 menurut jenis pekerjaan utama ditunjukkan dalam gambar 25. Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan memiliki persentase terbesar dalam status pekerjaan utama penduduk yang bekerja, yaitu 39,30 persen. Status dalam pekerjaan utama ini erat kaitannya dengan bidang pekerjaan utama yaitu sektor pertanian. Pertanian menjadi profesi mayoritas

penduduk di Kabupaten Pinrang, sehingga tenaga kerja dalam sektor ini pun berjumlah paling besar. Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar menempati urutan kedua terbanyak yaitu sebesar 21,27 persen. Status lapangan usaha tersebut masih berhubungan dengan sektor pertanian yang banyak membutuhkan tenaga operator mesin pertanian terutama pada saat panen, operator alat angkut digunakan untuk membawa padi yang telah dipanen serta pekerja kasar lain



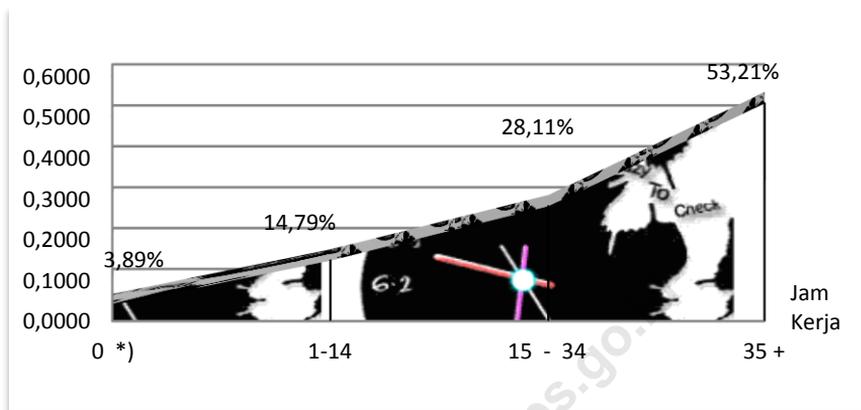
Gambar 26. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2017

Sementara menurut jenis pekerjaan utamanya, mayoritas penduduk di Kabupaten Pinrang berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (29,40 persen), buruh/karyawan/pegawai

(26,91 persen) dan berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain (21,59 persen). Masih sama dengan jenis pekerjaan utama, bahwa menurut status pekerjaan utamanya, berusaha dibantu buruh tidak dibayar adalah terkait sektor pertanian yang mayoritas mengusahakan lahan pertanian dengan dibantu anggota keluarga yang merupakan pekerja tak dibayar (pekerja keluarga).

6.5 Jumlah Jam Kerja

Terkait dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama seminggu, dapat diperoleh indikator pengangguran terselubung atau setengah pengangguran yaitu bagian dari angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Proporsi jumlah penduduk setengah pengangguran bermanfaat untuk dijadikan acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja. Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran maka semakin rendah tingkat utilisasi pekerja dan produktivitasnya. Akibatnya, pendapatan mereka pun rendah dan tidak ada jaminan sosial atas mereka. Hal ini sering terjadi di sektor informal yang rentan terhadap kelangsungan pekerja, pendapatan dan tidak tersedianya jaminan sosial. Sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan kemampuan bekerja mereka, misalnya menambah balai latihan kerja.



Gambar 27. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu, 2017

Menurut jumlah jam kerja selama seminggu, diketahui bahwa 53,21 persen pekerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 bekerja 35 jam atau lebih, 28,11 persen bekerja antara 15 sampai 34 jam, 14,79 persen bekerja 1 sampai 14 jam, dan sisanya 3,89 persen sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu. Dengan demikian tingkat pengangguran terselubung (terlihat bekerja akan tetapi jam kerjanya sangat kecil yaitu kurang dari 35 jam per minggu) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 adalah 46,79 persen. Tingkat pengangguran terselubung yang cukup tinggi ini kemungkinan dipengaruhi oleh tingginya pekerja keluarga dan pekerja bebas seperti yang telah dibahas pada gambar 27.

Fasilitas Perumahan di Kabupaten Pinrang 2017



Bab VII

Fasilitas Perumahan

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia selain sandang, pangan, dan kesehatan. Pentingnya rumah dapat dilihat dari fungsinya sebagai tempat tinggal, tempat istirahat, tempat berlindung dari hujan dan panas serta tempat berlangsungnya proses sosialisasi bagi semua anggota rumah tangga. Keberadaan rumah dan fasilitasnya dapat mempengaruhi tingkat kesehatan anggota rumah tangga sekaligus menunjukkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Semakin baik rumah dan fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin baik pula tingkat kesehatan dan tingkat kesejahteraan penghuninya. Bab ini akan menyajikan data dari beberapa aspek mendasar yang merupakan komponen penyusun sebuah rumah yang berkaitan dengan struktur bangunan perumahan dan fasilitas perumahan tersebut.

7.1 Kualitas Rumah Tinggal

Rumah yang berkualitas adalah rumah yang memenuhi syarat tertentu dilihat dari beberapa aspek, seperti luas lantai per kapita,

jenis lantai, dinding dan atap yang digunakan. Rumah yang dikategorikan sebagai rumah layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa persyaratan. Diantara persyaratan itu adalah dinding terluas terbuat dari tembok atau kayu, atap dari beton, genteng, sirap, seng ataupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

7.1.1 Jenis Dinding Rumah

Dalam publikasi ini dinding layak huni adalah dinding yang berbahan tembok dan kayu serta tidak lembab dan tidak tembus angin. Data tahun 2017 menunjukkan sebesar (73,52 persen) penduduk Kabupaten Pinrang sudah tinggal di dalam rumah dengan dinding yang layak. Mayoritas rumah penduduk Kabupaten Pinrang memiliki rumah dengan jenis dinding kayu yaitu sebanyak 40,33 persen (Gambar 28). Hal ini sesuai dengan rumah adat suku Bugis yang merupakan suku bangsa mayoritas di Kabupaten Pinrang.

Akibat harga kayu yang semakin mahal dan produksi kayu yang semakin menurun, sebagian penduduk beralih membangun rumah dengan dinding tembok. Pada tahun 2017 persentase rumah dengan dinding tembok di Kabupaten Pinrang adalah 33,19 persen, angka ini meningkat sebesar 3,37 persen dibandingkan tahun 2016 (29,82 persen). Penggunaan kayu sebagai dinding rumah pun

sedikit menurun, yaitu sebesar 6,09 persen jika dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 46,42 persen. Bahan lain yang banyak digunakan sebagai dinding di Kabupaten Pinrang adalah anyaman bambu sebanyak 14,50 persen dan dinding lainnya termasuk seng, sebanyak 11,82 persen. Jenis dinding bambu dan seng, biasanya digunakan oleh rumah tangga yang kurang mampu mengingat biaya yang dikeluarkan untuk membeli kedua jenis material tersebut lebih murah dari pada dinding kayu dan tembok.

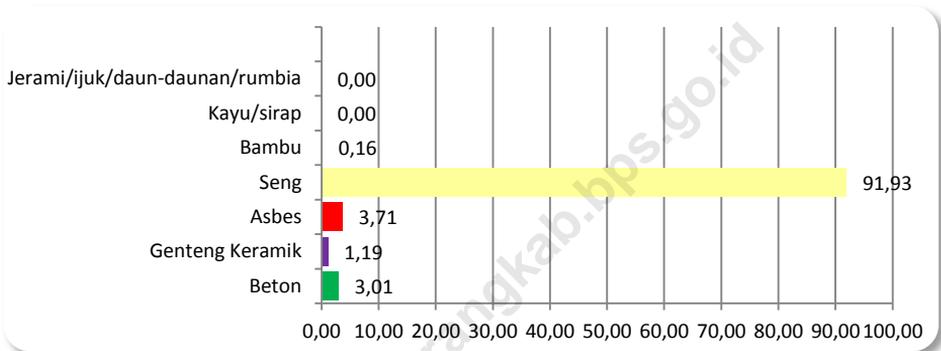


Gambar 28. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas, 2017

7.1.2 Jenis Atap

Salah satu fungsi atap adalah untuk melindungi penghuni rumah dari cuaca panas dan hujan. Berdasarkan Gambar 29, seluruh rumah tangga di Kabupaten Pinrang tinggal di dalam rumah yang menggunakan atap layak (beton, genteng, seng, sirap, asbes) sebesar 100,00 persen. Jenis atap seng paling banyak digunakan

oleh penduduk Kabupaten Pinrang mencapai lebih dari 91,93 persen, karena atap jenis ini paling sesuai dengan konstruksi rumah panggung yang ber dinding kayu dengan harga yang juga terjangkau.



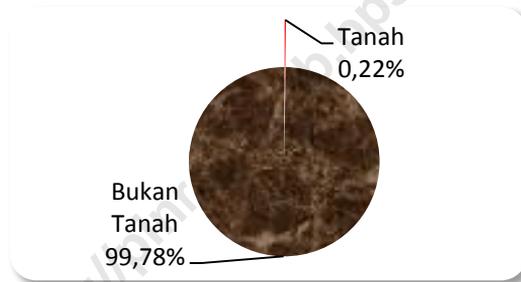
Gambar 29. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas, 2017

Persentase rumah tangga dengan jenis atap rumah terluas setelah seng adalah asbes yang digunakan oleh 3,71 persen rumah tangga, dan beton yang digunakan oleh 3,01 persen rumah tangga.

7.1.3 Jenis dan Luas Lantai

Jenis lantai rumah dapat mempengaruhi kondisi kesehatan anggota rumah tangga. Mayoritas rumah tangga di Kabupaten Pinrang memiliki jenis lantai terluas bukan tanah yaitu sebanyak 99,78 persen. Persentase rumah tangga dengan jenis lantai bukan

tanah menurun 0,22 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Lantai bukan tanah terdiri dari marmer/granit (0,49 persen), keramik (17,13 persen), ubin/tegel/teraso (5,69 persen), kayu/papan kualitas tinggi (60,66 persen), semen/bata merah (15,42 persen), dan bambu (0,19 persen). Masih terdapat 0,22 persen rumah tangga yang tinggal di dalam rumah yang berlantaikan tanah.



Gambar 30. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas, 2017

Selain jenis lantai yang digunakan, luas lantai rumah per kapita menentukan tingkat kesehatan penghuninya karena luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen dan mempercepat proses penularan penyakit. Luas lantai per kapita merupakan indikator untuk menghitung rumah kumuh. Semakin besar luas lantai per kapita, semakin baik tingkat kesejahteraan rumah tangga di wilayah tersebut. Luas lantai per kapita adalah luas lantai rumah dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga (ART). Dengan asumsi, setiap rumah tangga terdiri dari 5 ART dan

menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan, luas hunian minimum rumah adalah 36 m², maka luas minimum perkapita adalah 7,2 m².

Tabel 6. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah, Tahun 2017

Luas Lantai Rumah	Persentase
(1)	(2)
<= 19	1,90
20-49	21,14
50-99	47,79
100-149	20,24
150+	8,93
Total	100,00

Tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Pinrang memiliki luas lantai rumah 50-99 m². Akan tetapi, masih ada penduduk yang memiliki luas lantai rumah kurang dari 20 m². Sebanyak 21,14 persen penduduk memiliki luas lantai rumah 20-49 m², dan 1,90 persen penduduk memiliki luas lantai rumah kurang dari 19 m².

Jika dilihat secara lebih detail, terdapat penduduk dengan luas lantai per kapita yang masih di bawah standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah ($\leq 7,2 \text{ m}^2$), yaitu sebesar 8,09 persen. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, karena semakin kecil luas lantai per kapita, semakin sedikit pula ruang gerak yang ada, dan dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan di suatu rumah tangga. Namun demikian, rata-rata luas lantai rumah perkapita untuk kabupaten pinrang tergolong sudah cukup baik, yaitu $\geq 10 \text{ m}^2$.

Tabel 7. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah, Tahun 2017

Luas Lantai Per kapita	Persentase
(1)	(2)
≤ 7.2	8,09
7.3 - 9.9	7,61
10+	84,30
Total	100,00

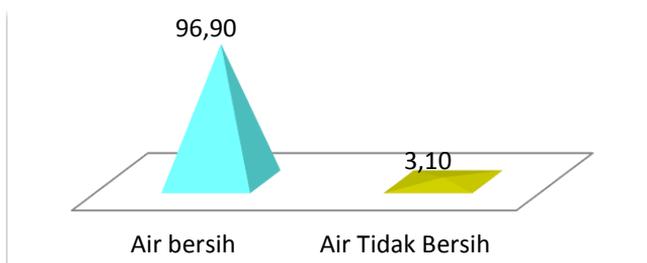
7.2 Fasilitas Rumah

Ketersediaan fasilitas rumah menentukan kenyamanan penghuninya, tingkat kesehatan, dan kemudahan dalam beraktivitas. Fasilitas yang penting agar rumah menjadi nyaman dan sehat untuk dijadikan tempat tinggal antara lain tersedianya

air minum bersih, sumber penerangan listrik, serta memiliki kloset sendiri dengan tangki septik/SPAL.

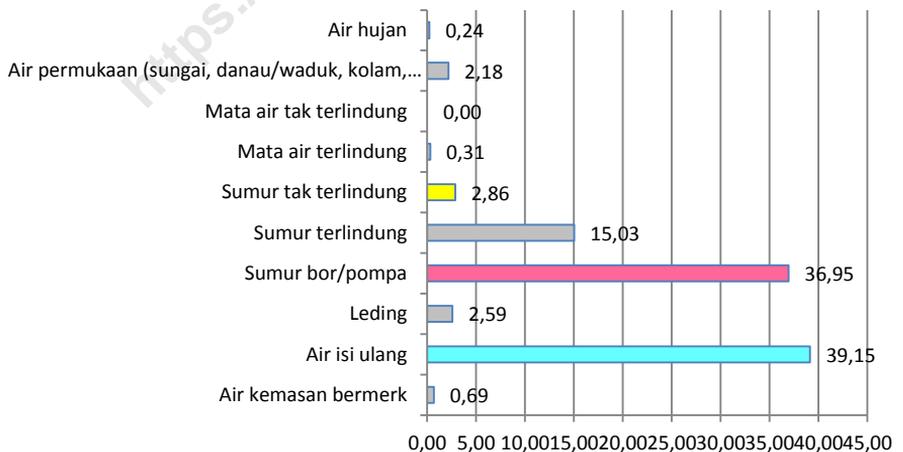
7.2.1 Air Minum Bersih

Salah satu fasilitas yang harus dipenuhi sebagai syarat dari rumah sehat adalah air minum bersih. Sumber air minum yang termasuk kategori air bersih yaitu air ledeng, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung. Khusus untuk sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung harus berjarak 10 meter atau lebih dari tempat penampungan tinja/limbah/kotoran terdekat agar dapat dikatakan layak. Pada Tahun 2017 sebagian besar penduduk Kabupaten Pinrang (96,90 persen) telah menggunakan sumber air minum bersih atau meningkat sekitar 2,97 persen dibanding tahun 2016. Sementara itu 3,10 persen tidak mendapatkan air bersih.



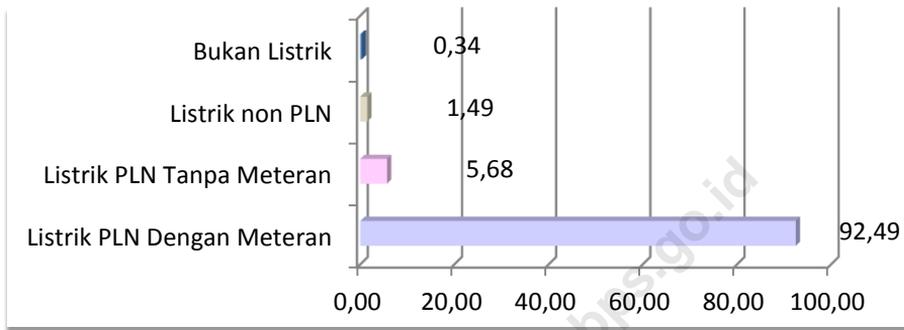
Gambar 31. Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Air Minum, 2017

Kualitas air bersih dapat dilihat dari sumbernya. Sumber air minum menurut derajat kualitasnya berturut-turut adalah air kemasan/isi ulang, bor/pompa, leding, sumur (sumur terlindung dan sumur tak terlindung), mata air terlindung, air sungai dan dan air hujan. Untuk rumah tangga yang menggunakan sumber air minum dari pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung harus memperhatikan jarak, dari tempat pembuangan akhir tinja. Jarak yang terbaik adalah minimal 10 meter dari tempat pembuangan tinja. Persentase terbesar sumber air untuk minum yang dipakai oleh penduduk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 adalah air isi ulang (39,15 persen) dan sumur bor/pompa sebesar 36,95 persen.



Gambar 32. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air untuk Memasak, 2017

7.2.2 Sumber Penerangan Listrik



Gambar 33. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik, 2017

Sumber penerangan yang dapat digunakan sebagai fasilitas penerangan diantaranya listrik (PLN dan non PLN), petromak, aladin, pelita, sentir, obor dan lainnya. Listrik merupakan sarana yang cukup penting untuk rumah tangga yaitu sebagai sumber penerangan dan merupakan kebutuhan penting masyarakat. Sumber penerangan di Kabupaten Pinrang terdiri atas 92,49 persen listrik PLN dengan meteran, 5,68 persen listrik PLN tanpa meteran 1,62 persen listrik non PLN dan 1,49 persen bukan listrik. Listrik non PLN umumnya digunakan oleh rumah tangga di daerah yang memiliki akses terbatas seperti beberapa desa di Kecamatan Lembang. Listrik non PLN umumnya bersumber dari swadaya masyarakat atau bantuan lembaga internasional. Sumber tenaga listrik non PLN di Kabupaten Pinrang adalah kincir air. Masih

terdapat 0,34 persen rumah tangga yang tidak menggunakan listrik di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017. Beberapa wilayah di Kabupaten Pinrang yang tergolong daerah sulit memang belum terjangkau listrik. Sehingga untuk kehidupannya mereka masih menggunakan penerangan tradisional.

7.2.3 Tempat Pembuangan Tinja

Sistem pembuangan tinja erat kaitannya dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan rumah tangga. Sistem pembuangan tinja sangat mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitar tempat tinggal rumah tangga tersebut. Kriteria akses terhadap sanitasi layak adalah penggunaan fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) milik sendiri atau bersama, menggunakan kloset dan tempat pembuangan akhir tinjanya berupa tangki septik atau sarana pembuangan air limbah (SPAL).

Berdasarkan data Susenas, 84,74 persen penduduk Kabupaten Pinrang memiliki fasilitas BAB, sedangkan sisanya 15,26 persen tidak memiliki fasilitas BAB. Dari 84,74 persen tersebut, terdapat tiga jenis kloset yang digunakan oleh penduduk Kabupaten Pinrang, yaitu kloset leher angsa, plengsengan tanpa tutup serta cemplung/cubluk. Kloset Leher Angsa merupakan kloset leher lubang closet berbentuk lengkungan, dengan demikian akan terisi air, gunanya sebagai sumbat sehingga dapat mencegah bau busuk

serta masuknya binatang-binatang kecil. Kloset model ini adalah model yang terbaik yang dianjurkan dalam kesehatan lingkungan. Kloset leher angsa digunakan oleh mayoritas rumah tangga (99,20 persen).

Berdasarkan data Susenas 2017, penggunaan kloset leher angsa sebesar 99,20 persen, kloset plengsengan dengan tutup 0,13 persen, kloset plengsengan tanpa tutup 0,32 persen dan hanya 0,36 persen rumah tangga yang menggunakan cemplung/cubluk. Dengan kata lain penggunaan fasilitas pembuangan air besar di Kabupaten Pinrang Tahun 2017 sebagian besar menggunakan jenis kloset yang sehat.



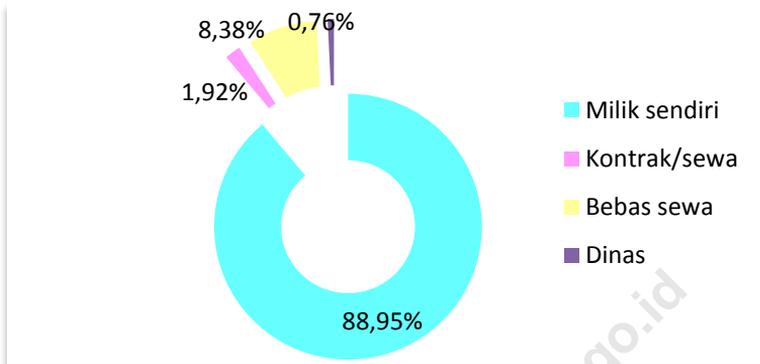
Gambar 34. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2017

Tempat pembuangan akhir tinja yang digunakan sebagian besar rumah tangga (98,99 persen) telah menggunakan tangki dengan dasar semen. Sementara itu, 1,01 persen rumah tangga masih

belum memiliki pembuangan akhir tinja yang layak. Dampak serius membuang kotoran yang tidak sehat menyebabkan pencemaran tanah, air dan udara sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan dan pada akhirnya mempengaruhi kesehatan anggota rumah tangga.

7.3 Status Kepemilikan Rumah

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat mempengaruhi status kepemilikan tempat tinggal. Status kepemilikan rumah menurut data susenas dikelompokkan menjadi lima macam yaitu milik sendiri, sewa/kontrak, bebas sewa, dinas dan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah tinggal milik sendiri dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.



Gambar 35. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2017

Sebagian besar penduduk Kabupaten Pinrang telah memiliki rumah dengan status milik sendiri yaitu sebanyak 88,95 persen. Untuk status kepemilikan rumah tinggal kontrak/sewa, sebanyak 1,92 persen. 8,38 persen rumah tangga menempati rumah tinggal bebas sewa milik orang lain dan 0,76 persen rumah tangga menempati rumah dengan status dinas.

<https://pinrangkab.bps.go.id>



Pengeluaran
per kapita Sebulan
untuk Makanan dan Non Makanan
Penduduk Kabupaten Pinrang

Konsumsi Makanan
54,76 persen, Rp. 468.473,-

Rata-rata konsumsi
per kapita sebulan
rumah tangga
di Kabupaten Pinrang
adalah Rp 855.502



Konsumsi Non Makanan
45,24 persen, Rp. 387.029,-

Bab VIII

Konsumsi Rumah Tangga dan Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan masalah mendasar yang harus diselesaikan oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Penanggulangan kemiskinan memerlukan langkah-langkah strategis dan sistemik yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Salah satu kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan program perlindungan sosial. Perlindungan sosial merupakan bagian dari “Nawa Cita” atau Sembilan agenda perubahan yang dicanangkan pemerintah yaitu mengenai peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar warga miskin dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin. Selain itu berbagai program pembangunan juga diluncurkan untuk penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Penanganan kemiskinan perlu didukung oleh data yang berkualitas. Hingga saat ini BPS bertugas untuk mengumpulkan data kemiskinan

makro dan mikro. Data kemiskinan makro adalah data persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara data kemiskinan mikro adalah data yang menunjukkan nama dan alamat rumah tangga miskin. Data kemiskinan mikro digunakan untuk menentukan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, data kemiskinan makro lebih banyak digunakan untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, menentukan target dalam perencanaan pembangunan untuk pengentasan kemiskinan, serta membandingkan kondisi kemiskinan antar waktu dan antar daerah.

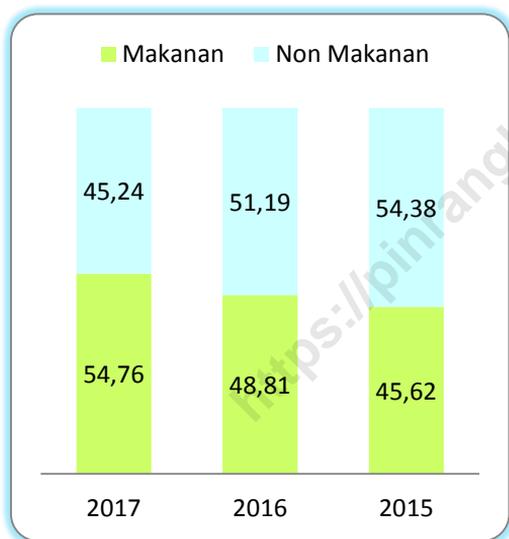
Pengukuran kemiskinan makro yang dilakukan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pendekatan pengeluaran rumah tangga karena data pendapatan yang akurat sulit diperoleh. Pada publikasi ini akan ditampilkan hasil penghitungan kemiskinan makro yang dihasilkan dari data konsumsi/pengeluaran yang dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

8.1 Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan

Menurut pendekatan kebutuhan dasar, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis GK dibangun

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pinrang 2018

dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari; sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.



Gambar 36. Persentase Rata-rata Pengeluaran per kapita Sebulan untuk Makanan dan Non Makanan Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2017

Data persentase konsumsi makanan terhadap total pengeluaran pada periode 2015-2017 menunjukkan kecenderungan meningkat. Sebaliknya, untuk persentase konsumsi non makanan justru menurun. Kondisi tahun 2017 ini menunjukkan ada banyak perubahan pola konsumsi dari komoditi non makanan ke makanan. Akan tetapi persentase konsumsi non makanan yang masih cukup besar merupakan indikasi adanya peningkatan kesejahteraan.

Pada tahun 2017, rata-rata konsumsi per kapita sebulan rumah tangga di Kabupaten Pinrang adalah Rp 855.502,-. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2016, yaitu Rp 763.612,-. Nilai konsumsi per kapita sebulan pada tahun 2017 tersebut lebih kecil daripada rata-rata konsumsi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar Rp 927.908,- akan tetapi peringkat Kabupaten Pinrang pun masih tetap menempati urutan ke sebelas baik pada tahun 2016 maupun tahun 2017.

Jika dihitung berdasarkan persentase pada Gambar 36, maka rata-rata konsumsi makanan per-kapita sebulan rumah tangga di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 468.473,- atau 54,76 persen dari total pengeluaran. Mengalami peningkatan 5,95 poin dibandingkan tahun 2016. Sebaliknya, persentase pengeluaran non makanan menunjukkan penurunan dari 51,19 persen di tahun 2016 menjadi 45,24 persen di tahun 2017. Jika dirata-ratakan, pengeluaran per-kapita non-makanan menjadi sebesar Rp. 387.029,- dari Rp. 390.893,- di tahun 2016 dari total pengeluaran rumah tangga.

Tabel 8. RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN (RUPIAH) MENURUT KELOMPOK BARANG DAN DAERAH TEMPAT TINGGAL, MARET 2017
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA (RUPIAHS) BY COMMODITY GROUP AND URBAN RURAL CLASSIFICATION, MARCH 2017

Kabupaten / Regency : Pinrang

Kelompok Barang <i>Community Group</i>	Perkotaan <i>Urban</i>	Perdesaan <i>Rural</i>	Perkotaan + Perdesaan <i>Urban + Rural</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
A. MAKANAN / FOOD			
1. Padi-padian / <i>Cereals</i>	46 111	67 210	61 499
2. Umbi-umbian / <i>Tubers</i>	1 956	2 913	2 654
3. Ikan/udang/cumi/kerang <i>Fish/shrimp/common squid/shells</i>	58 278	66 449	64 237
4. Daging / <i>Meat</i>	14 761	9 155	10 673
5. Telur dan Susu / <i>Eggs and milk</i>	26 928	22 826	23 936
6. Sayur-sayuran / <i>Vegetables</i>	26 780	22 576	23 714
7. Kacang-kacangan / <i>Legumes</i>	7 667	6 697	6 960
8. Buah-buahan / <i>Fruits</i>	15 387	15 233	15 275
9. Minyak dan kelapa / <i>Oil and coconut</i>	9 753	11 707	11 178
10. Bahan Minuman / <i>Beverages stuffs</i>	13 600	14 670	14 381
11. Bumbu-bumbuan / <i>Spices</i>	8 695	6 534	7 119
12. Konsumsi lainnya <i>Miscellaneous food items</i>	9 653	11 373	10 907
13. Makanan dan Minuman jadi <i>Prepared food and beverages</i>	151 492	150 851	151025

14. Rokok / <i>Cigarettes</i>	65 414	64 751	64 931
-------------------------------	--------	--------	--------

JUMLAH MAKANAN <i>TOTAL OF FOODS</i>	456 474	472 945	468 487
--	---------	---------	---------

B. BUKAN MAKANAN / NON FOOD

1. Perumahan dan fasilitas rumah tangga <i>Housing and household facilities</i>	192 108	180 064	183 324
2. Aneka barang dan jasa <i>Goods and services</i>	89 645	72 900	77 433
3. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala <i>Clothing, footwear, headgear</i>	34 358	27 769	29 553
4. Barang tahan lama / <i>Durable goods</i>	37 210	60 767	54 391
5. Pajak, pungutan dan asuransi <i>Tax and insurance</i>	40 082	20 656	25 915
6. Keperluan pesta dan upacara/kenduri <i>Parties and ceremonies</i>	24 452	13 413	16 401

JUMLAH BUKAN MAKANAN <i>TOTAL OF NON FOOD</i>	417 856	375 570	387 016
---	---------	---------	---------

JUMLAH / TOTAL	874 330	848 514	855 502
-----------------------	---------	---------	---------

8.2 Penduduk Miskin

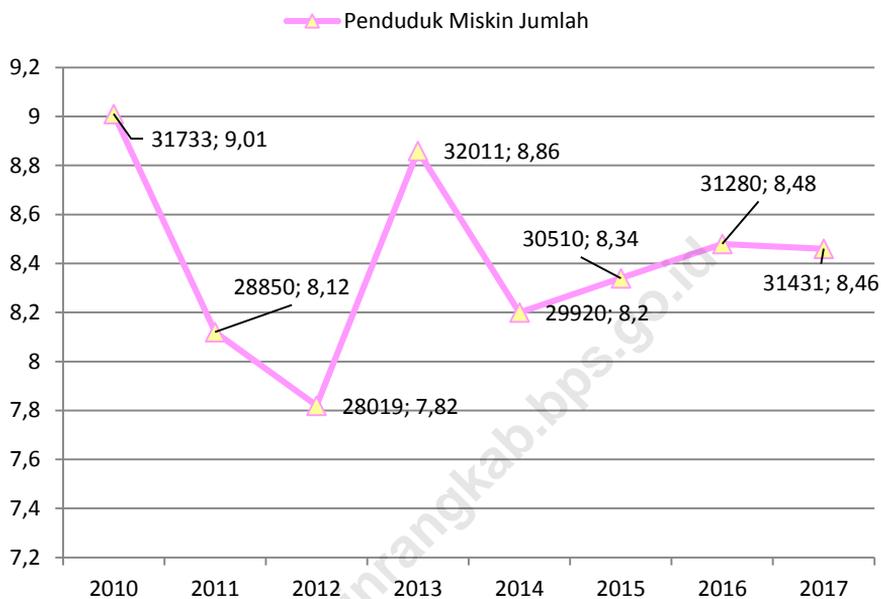
Menurut Bappenas miskin adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain: terpenuhinya

kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Definisi tersebut diterjemahkan dalam konsep kemiskinan makro yang dilakukan oleh BPS sebagai rumah tangga yang pengeluaran per-kapita sebulan lebih rendah dibandingkan garis kemiskinan (GK).

Tabel 9. Garis Kemiskinan Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2017

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)
2013	221.717
2014	228.150
2015	234.897
2016	250.163
2017	256.054

Garis kemiskinan Kabupaten Pinrang tahun 2017 adalah Rp 256.054,-. Terlihat dari Tabel 9 garis kemiskinan cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga-harga komoditi makanan maupun non makanan di Kabupaten Pinrang sebagai dampak adanya fluktuasi harga BBM, kenaikan harga komoditi dunia, penurunan nilai tukar yang berdampak pada harga barang impor dan sebagainya.



Gambar 37. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pinrang Tahun 2010-2017

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pinrang mengalami penurunan dan peningkatan sejak tahun 2010 hingga 2017. Selama 3 tahun terakhir sejak tahun 2014 hingga tahun 2016, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Sementara itu, pada tahun 2017, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pinrang mengalami penurunan sebesar 0,02persen yaitu dari 8,48 persen atau 31.280 jiwa menjadi 8,46 persen atau 31.431 jiwa.

Kenaikan garis kemiskinan pada umumnya akan diikuti peningkatan persentase penduduk miskin terutama jika kenaikan garis kemiskinan terjadi akibat kenaikan harga yang tidak diimbangi oleh kenaikan pendapatan masyarakat. Kondisi pada tahun 2014 hingga 2016 menunjukkan bahwa gejolak ekonomi yang terjadi berimbas pada kenaikan kemiskinan karena tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sementara itu di tahun 2017 kenaikan garis kemiskinan (tabel 9) justru mengakibatkan penurunan persentase penduduk miskin. Fenomena ini menunjukkan adanya kenaikan daya beli masyarakat atau kenaikan pendapatan sehingga justru menurunkan persentase penduduk miskin.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tabel 10. Tabel Kemiskinan Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2017

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)
2013	1.16	0.22
2014	1.00	0.17
2015	1,66	0,52
2016	1,30	0,36
2017	1,62	0,44

Pada periode 2016-2017 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,30 pada tahun 2016 menjadi 1,62 pada tahun 2017. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan, pada tahun 2017 sebesar 0.44 lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,36. Peningkatan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik, Bappenas, UNFPA. 2012. Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2035. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

..... 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2035. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

.....2014. Proyeksi Penduduk Indonesia Umur Tertentu dan Umur Satu Tahunan 2010-2025. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2016. Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang: Pinrang.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2017. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Sulawesi Selatan Per

Kabupaten/Kota. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi

Selatan: Makassar.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

<https://pinrangkab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Andi Isa No.18, Pinrang, Sulawesi selatan 91211

Telp./Fax : (0421) 921021

E-mail : bps7315@bps.go.id

Homepage : pinrangkab.bps.go.id